



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2020-2024**



**Jalan H.A.M Pattana Endeng
No. 46 Telp. (0426) 2325293,
Fax. (0426) 2325294 Mamuju
Kode Pos 91511**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat disusun berpedoman pada Renstra Kementerian Agama dan Renstra Unit Eselon I tahun 2020-2024, hasil evaluasi Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015-2019, serta aspirasi masyarakat. Dalam proses penyusunannya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menggunakan metode dan kerangka berpikir yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama tahun 2020-2024.

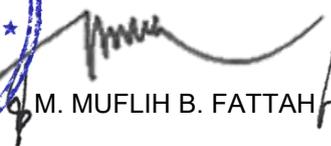
Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024 ini memuat tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun mendatang yang fokus pada pencapaian tujuan Kementerian Agama. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ini telah mengacu pada 5 (lima) tujuan Kementerian Agama selaras dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Kelima tujuan tersebut diterjemahkan ke dalam 54 sasaran kegiatan yang selaras dengan sasaran kegiatan pada Renstra Unit Eselon I tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024 agar menjadi rujukan utama dalam penyusunan Renstra di seluruh satuan kerja di Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, serta acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam periode lima tahun ke depan. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah pada sektor pembangunan bidang Agama dan Pendidikan tahun 2024.



Mamuju, 10 Agustus 2020

Kepala


M. MUFLIH B. FATTAH



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
SULAWESI BARAT
NOMOR 219 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENSTRA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk :
 1. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 10 Agustus 2020,



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

M. Muflih B. Fattah
M. MUFLIH B. FATTAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR		i
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT		ii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR GAMBAR		v
DAFTAR TABEL		v
DAFTAR SINGKATAN		vii
BAB I – PENDAHULUAN		1
1. 1	Kondisi Umum	1
1. 1. 1	Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama	3
1. 1. 2	Pengukuhan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis	5
1. 1. 2. 1	Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan	8
1. 1. 3	Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata	10
1. 1. 3. 1	Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar	11
1. 1. 3. 2	Penyuluh Agama yang Kompeten	12
1. 1. 3. 3	Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar	15
1. 1. 3. 4	Penghulu yang Kompeten	18
1. 1. 3. 5	Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi	19
1. 1. 4	Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan	20
1. 1. 5	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama	22
1. 1. 5. 1	Kontribusi Opini Laporan Keuangan	22
1. 1. 5. 2	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	23
1. 1. 5. 3	Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	26
1. 1. 6	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	45
1. 1. 7	Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	53
1. 2	Potensi dan Permasalahan	57
1. 2. 1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama	58
1. 2. 2	Peningkatan Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar Umat Beragama	58
1. 2. 3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Keagamaan	59

1. 2. 4	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan	61
1. 2. 5	Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan	61
BAB II - TUJUAN DAN SASARAN		63
2. 1	Tujuan	64
2. 2	Sasaran Kegiatan	63
2.3	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	81
BAB III – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		107
3. 1	Target Kinerja	107
3. 2	Kerangka Pendanaan	126
BAB IV - PENUTUP		132
Lampiran : Matrisk Kinerja dan Pendanaan		133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Dokumentasi Apresiasi Atas Kontribusi Serta Kerjasama FKUB dalam Pembangunan Kehidupan dan Kerukunan Antar Umat Beragama	
Gambar 2	Dokumentasi Kesadaran dan Keberagaman Kerukunan Umat Beragama	
Gambar 3	Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Moderasi Beragama	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Potret Persentase Keaktifan Umat Beragama pada Rumah Ibadah sampai dengan Tahun 2019	
Tabel 2	Potret Persentase Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan sampai dengan Tahun 2019	
Tabel 3	Konflik yang terselesaikan Kurun Waktu 2015-2019	
Tabel 4	Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar	
Tabel 5	Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi	
Tabel 6	Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk	

Tabel 7	Jumlah Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar	
Tabel 8	Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi	
Tabel 9	Data Indeks Kepuasan Layanan Haji Embarkasi UPG	
Tabel 10	Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Sulawesi Barat	
Tabel 11	Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	
Tabel 12	Data Siswa Madrasah Penerima BSM/PIP	
Tabel 13	Data Kelulusan Seleksi Calon Peserta PBSB Tahun 2015 s. d. 2019	
Tabel 14	Angka Partisipasi Kasar (APK)	
Tabel 15	Angka Partisipasi Murni (APM)	
Tabel 16	Data Nilai Rata-Rata Hasil UN	
Tabel 17	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s. d. 2019	
Tabel 18	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Kristen Tahun 2015 s. d. 2019	
Tabel 19	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Katolik Tahun 2015 s. d. 2019	
Tabel 20	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Hindu Tahun 2015 s. d. 2019	
Tabel 21	Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Buddha Tahun 2015 s. d. 2019	
Tabel 22	Data Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah Sulawesi Barat yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi	
Tabel 23	Indeks Integritas Siswa Madrasah Sulawesi Barat	
Tabel 24	Sasaran Strategis dan Sasaran Program	
Tabel 25	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024	
Tabel 26	Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Tahun 2024	
Tabel 27	Indikasi Kebutuhan Pendanaan 9 (Sembilan) Program Kantor Wilayah	

DAFTAR SINGKATAN

APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
AYIC	<i>ASEAN Youth Interfaith Camp</i>
Balitbang	Badan Penelitian dan Pengembangan
BOP	Bantuan Operasional Pendidikan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPS	Badan Pusat Statistik
BSM	Beasiswa Siswa Miskin
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dirjen	Direktur Jenderal
DLAB	Dialog Lintas Agama dan Budaya
Dumas	Pengaduan Masyarakat
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IID	Indonesia-India Interfaith Dialogue
IKU	Indikator Kinerja Utama
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
IRC	<i>Inter Religion Council</i>
Kanwil	Kantor Wilayah
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KDA 2019	Kementerian Agama dalam Angka 2019
Kepmen	Keputusan Menteri
KSM	Kompetisi Sains Madrasah
KTI	Karya Tulis Ilmiah
KUA	Kantor Urusan Agama
KUB	Kerukunan Umat Beragama
MA	Madrasah Aliyah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIKTA	Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MYERS	<i>Madrasah Young Researchers Super Camp</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NR	Nikah Rujuk
NRG	Nomor Registrasi Guru
OSN	Olimpiade Sains Nasional
PAI	Pendidikan Agama Islam
PAN	Pendayagunaan Aparatur Negara
PBSB	Program Beasiswa Santri Berprestasi
Pendis	Pendidikan Islam
PIP	Program Indonesia Pintar
PKUB	Pusat Kerukunan Umat Beragama
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	Pegawai Negeri Sipil

PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PTS	Perguruan Tinggi Swasta
PTSP	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RA	Raudhatul Athfal
Renstra	Rencana Strategis
SAPA	Sarapan BersamaPenyuluh Agama
SD	Sekolah Dasar
SDM	Sumber Daya Manusia
SDTK	Sekolah Dasar Teologi Kristen
SK	Surat Keputusan
SMPTK	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
Sulbar	Sulawesi Barat
UPG	Embarkasi Ujung Pandang
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TK	Taman Kanak-Kanak
UIN	Universitas Islam Negeri
UN	Ujian Nasional
USBN	Ujian Sekolah Berstandar Nasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
Wamenlu	Wakil Menteri Luar Negeri
ZI	Zona Integritas

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum sekaligus potensi dan permasalahan yang merupakan penggambaran atas hasil evaluasi pencapaian tujuan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat periode sebelumnya (2015-2019). Selain capaian-capaian, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Agama, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam lima tahun terakhir dan berbagai *Focuss Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada beberapa kesempatan. Kondisi umum, potensi dan permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat pada periode Renstra sebelumnya dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama periode 2020-2024.

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum dari Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024 berisi tentang pencapaian-pencapaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat pada periode pembangunan sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015-2019, program-program yang dijalankan bertujuan untuk mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Sulawesi Barat yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Berdasarkan visi tersebut, maka terlihat bahwa pada periode Renstra

tahun 2015-2019, visi pembangunannya terbagi atas **empat komponen**, yaitu: **taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera**.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat telah menyusun 7 (tujuh misi) yang mendukungnya, yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama;
3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas;
4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;
5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan; dan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk 8 (delapan) tujuan dengan sarasanya masing-masing berikut indikatornya guna memudahkan realisasi dan pengukuran capaiannya, yaitu :

- a. peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- b. penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis;
- c. pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata;
- d. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi

- keagamaan;
- e. peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
 - f. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama;
 - g. peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan; dan
 - h. peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Adapun capaian sasaran dimaksud selama kurun waktu 2015-2019 berdasarkan indikatornya masing-masing disajikan dalam uraian berikut.

1.1.1 Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama merupakan agenda penting dan strategis. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada pemeluk agama diukur melalui indikator: 1) Meningkatnya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah; dan 2) Meningkatnya jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan. Dua indikator berikut komponennya tersebut menjadi penting untuk melihat dinamika ruang public sehubungan dengan kepedulian sosial, relasi antar manusia, melestarikan lingkungan, etika dan budi pekerti, serta kepatuhan terhadap Negara dan pemerintah.

Rasio penyuluh dibandingkan jumlah umat beragama di Sulawesi Barat adalah ; Islam 1 : 2.099, Kristen 1 : 1.168, Katolik 1 : 3.43, Hindu 1 : 665, Buddha 1 : 225, sedangkan secara ideal ratio penyuluh dan umat beragama adalah 1 : 300, sehingga jumlah penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik dan Hindu jika dibandingkan dengan umat beragama masih belum ideal akibatnya banyak masyarakat dan tempat ibadah di Sulawesi Barat yang belum tersentuh berkaitan dengan pengukuran indikator dimaksud. Dengan demikian masih ada pekerjaan besar untuk periode

berikutnya.

Variasi persentase keaktifan umat dan peran sosial keagamaan rumah ibadah pada masing-masing kelompok pemeluk agama sam pai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Potret Umat Beragama pada Rumah Ibadah
sampai dengan Tahun 2019

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Penduduk	1.251.278	232.377	17.515	27.278	900	-	1,529.348
Jumlah yang Aktif pada Rumah Ibadah	525.536	139.425	4.378	6.819	500	-	676.658
Persentase Keaktifan Ummat	42 %	60 %	25 %	25 %	56 %	0 %	44 %

Sumber : KDA 2019 dan Laporan Kinerja 2019

Tabel 2
Potret Peran Rumah Ibadah Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan
sampai dengan Tahun 2019

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Tempat Ibadah	2.948	1.147	137	59	4	-	14.085
Jumlah Rumah Ibadah yang Melakukan Kegiatan Sosial	716	1.147	137	54	4	-	3.492
Persentase Peran Rumah Ibadah	24 %	100 %	100 %	92 %	100 %	0 %	25 %

Sumber : KDA 2019 dan Laporan Kinerja 2019

1.1.2 Penguatan Suasana Kerukunan Hidup Umat Beragama yang Harmonis

Kerukunan umat beragama adalah kondisi dimana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan di wilayah Sulawesi Barat serta senantiasa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai upaya terwujudnya masyarakat Sulawesi Barat yang rukun dalam keberagaman agama ditempuh melalui layanan-layanan strategis dalam bentuk penguatan dialog lintas agama, *knowledge sharing* aktor-aktor kerukunan umat beragama, dan konsinyering tokoh lintas agama.

Untuk memotret realitas kerukunan umat beragama dalam hubungannya dengan pembangunan kehidupan sosial keagamaan, digunakan indikator pengukuran berupa : (1) indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks KUB) provinsi; dan (2) jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama. Indeks KUB adalah survei yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat yang mengukur tingkat kerukunan umat beragama di Sulawesi Barat yang mencakup tiga dimensi, yaitu : 1. Toleransi; 2. Kesetaraan; 3. Kerjasama. Sebagai sebuah instrumen, Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuannya untuk memberikan informasi dan masukan bagi instansi/lembaga terkait tentang peta indeks KUB Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya, data tersebut dapat menjadi bahan kebijakan dalam rangka membangun iklim kerukunan umat beragama yang lebih kondusif. Capaian indeks KUB Tahun 2015-2019 di Sulawesi Barat dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 1

**Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Barat
Tahun 2015 - 2019**



Sumber :Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019

Capaian indeks KUB cenderung menurun di tahun 2015 menuju 2019, dan perbandingan di tahun 2015 dengan tahun 2019 turun sebesar 1,15%. Indeks KUB ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Sulawesi Barat menurun masih di dalam kategori tinggi. Hal ini berarti kondisi kerukunan umat beragama berjalan dinamis.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penguatan kesadaran kerukunan umat beragama melalui terbentuknya Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama. Selama tahun 2017 sampai dengan 2019 telah dibentuk 2 Desa Sadar Kerukunan, yakni di tahun 2016 di desa Pelongaan, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah; tahun 2018 di Desa Karave Kec. Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu.

Sebagai apresiasi atas kontribusi serta kerjasama FKUB dalam pembangunan kehidupan dan kerukunan antar umat beragama, Sulawesi Barat

telah mendapatkan Anugerah Bidang Kerukunan (*Harmony Award*) pada tahun 2018 dengan mendapatkan 1 Kategori yakni Daerah Terukun.

Gambar 1

**Dokumentasi Apresiasi Atas Kontribusi Serta KerjaSama
FKUB dalam Pembangunan Kehidupan dan Kerukunan Antar Umat Beragama**



WUJUD NYATA PENGEMBANGAN DAN KESADARAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT

Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang plural karena keberagaman, baik dari sisi suku, agama, ras dan antar golongan telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan kerukunan berupa penyelenggaraan Dialog antar dan inter umat beragama dan Gerak Jalan Kerukunan.

Gambar 2

Dokumentasi

Kesadaran dan Keberagaman Kerukunan Umat Beragama



Deklarasi Kita Tetap Bersaudara

1. 1. 2. 1 Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Berwawasan Moderat dan Multikultural serta Pembinaan Aliran Keagamaan

Pembangunan agama, melalui FKUB, memiliki peran strategis dalam upaya mendukung terwujudnya masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap moderasi beragama dan paradigma multikultural dalam memahami serta menghayati makna kemajemukan sosial, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Ada empat indikator moderasi, yaitu: komitmen kebangsaan, anti kekerasan, akomodatif terhadap kebudayaan lokal, dan toleransi.

Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama, khususnya di Sulawesi Barat, adalah fakta masyarakat Sulawesi Barat yang sangat plural dan multikultural. Bangsa kita terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan, dan setiap perbedaan

potensial melahirkan gesekan atau konflik, yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan bila tidak dikelola dengan baik dan bijaksana. Multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin pada bangsa Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang dikenal dengan semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika.*” Multikultural sendiri sedang menjadi isu penting saat ini, utamanya pasca rangkaian konflik etnik dan agama dalam beberapa tahun terakhir. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan problem mengelola konflik dan keragaman saja, akan tetapi juga menyangkut pengakuan keberadaan terhadap perbedaan antar umat beragama Sulawesi Barat.

Kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan moderasi beragama pada tahun 2015 s.d 2019 dilakukan melalui pembinaan wawasan moderasi dan multikultural sebanyak 9 kali dengan jumlah peserta 370 orang. Dialog moderasi beragama sebanyak 5 kegiatan dengan peserta berjumlah 380 orang, dialog tokoh agama sebanyak 11 kegiatan dengan jumlah peserta 361 orang, yang didalamnya melibatkan aktor-aktor kerukunan dari berbagai kalangan dengan mempromosikan dakwah keagamaan yang moderat.

Wujud nyata kegiatan tersebut dengan program berikut :

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Barat menggelar Dialog Lintas Agama terkait Pemeliharaan dan Penguatan Kerukunan Umat Beragama di Hotel D' Maleo. Peserta yang hadir dalam dialog tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Pengurus FKUB Provinsi dan Kabupaten dan puluhan peserta dialog yang merupakan tokoh lintas agama. Kegiatan ini sinergi dengan Sulawesi Barat yang mendapat julukan Maju Malaqbi.

Gambar 3

Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Moderasi Beragama



Peningkatan Moderasi Beragama

Hasil yang dicapai adalah meningkatnya kesadaran terhadap realitas moderasi beragama dan multikultural serta memahami makna kemajemukan sosial, multi-kultur dan multi-religi sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, harmonis, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap agama, bangsa dan negara. Adapun terkait dengan tugas pembinaan aliran keagamaan (bukan penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa), upaya yang dilakukan adalah memfasilitasi pertemuan dan dialog dengan pihak-pihak yang bersengketa, mengkoordinasikan penyelesaiannya dan memproteksi hasil musyawarah dan mufakat.

1.1.3 Pemenuhan Kebutuhan Akan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Berkualitas dan Merata

Tugas menyelenggarakan pelayanan keagamaan adalah amanah pokok Kementerian Agama, tak terkecuali Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagai institusi vertikal. Keberhasilan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan bagi umat beragama di wilayah Sulawesi Barat ditandai

dengan beberapa indikator, yaitu: 1) Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar; 2) Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi; 3) Jumlah KUA yang memenuhi standar; 4) Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi; dan 5) Survey Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi.

1.1.3.1 Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

Rumah ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. Selain sebagai simbol “keberadaan” pemeluk agama, rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat melakukan ibadah, artinya fungsi rumah ibadah disamping sebagai tempat peribadahan diharapkan dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jemaahnya, agar kehidupan spiritual keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Untuk mendukung fungsi tersebut, keberadaan rumah ibadah yang memenuhi standar kebutuhan dan kenyamanan umat sangat diperlukan. Rumah ibadah yang memberikan keamanan, bersih, sehat dan memiliki prasarana dan sarana perlengkapan ibadah menjadi yang memadai menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan bantuan stimulus fasilitasi sarana dan prasarana rumah ibadah dalam bentuk pembangunan, rehabilitasi, dan sarana kebersihan, yang berhasil menstimuli masyarakat untuk menghimpun dana swadaya dalam penyelesaian pembangunan/rehabilitasi/pengembangan rumah ibadah. Selain bantuan fisik juga dilakukan pembinaan/workshop kepada para pengelola rumah ibadah semisal takmir masjid/marbot agar dalam pengelolaan rumah ibadah mengikuti standar manajemen yang lebih tertata dan tertib.

Sampai dengan tahun 2019, telah tersedia 2.948 masjid/mushola, 1.147 gereja Kristen/rumah kebaktian, 137 gereja Katolik/paroki/stasi/kapel, 59 pura dan sanggar, 4 rumah ibadah Buddha (vihara, cetiya, kelenteng, pusdiklat), serta 0

Kelenteng / Konghucu. Sementara jumlah rumah ibadah yang telah memenuhi standar sebagai hasil dari capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat selama kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Tempat Ibadah yang Memenuhi Standar

Agama	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Islam	4	5	6	7	8
Kristen	400	440	448	681	688
Katolik	NA	6	10	136	137
Hindu	NA	5	10	20	59
Buddha	NA	3	3	3	4
Konghucu	NA	0	0	0	0
TOTAL	4	459	477	847	896

Sumber : Laporan Capaian Kinerja 2015- 2019

Tahun 2015 tidak ada data mengenai capaian indikator tersebut. Sementara untuk tahun 2016 dan 2017 indikatornya berupa rumah ibadah yang mendapatkan bantuan fasilitasi peningkatan pelayanan, sehingga tampak dari jumlahnya juga relatif sangat kecil karena didasarkan pada jumlah anggaran bantuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan sangat terbatas. Sementara itu untuk tahun 2018 dan 2019 didasarkan pada pendataan mengenai rumah ibadah yang dinilai memenuhi standar kenyamanan umat yang meliputi keamanan, kebersihan, sehat dan kelengkapan prasarana dan sarana peribadatan.

1.1.3.2 Penyuluh Agama yang Kompeten

Penyuluh Agama memainkan peranan strategis dalam memperkuat kehidupan beragama warga masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Agama telah memprogramkan peningkatan kuantitas penyuluh agama dengan merekrut tenaga penyuluh agama baik PNS maupun Non-PNS. Dalam meningkatkan kualitas penyuluh agama, mulai tahun 2019 dibangun sistem elektronik kinerja penyuluh agama sebagai instrumen pengukuran kinerja. Peningkatan jumlah penyuluh Non-

PNS yang direkrut Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berasal dari sebagian pemuka dan ahli agama. Selain itu, peningkatan kualitas dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang berisi nilai-nilai ketuhanan, dilakukan secara baik mandiri maupun berkelompok. Peningkatan kompetensi dan kinerja penyuluh agama juga telah dilakukan melalui berbagai forum pembinaan, antara lain melalui program mandatory SAPA penyuluh.

Beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh penyuluh agama sehingga penyuluh dapat menjadi penyuluh yang kompeten antara lain kompetensi dalam ilmu agama, kompetensi komunikasi, kompetensi sosial serta kompetensi moral. Disamping empat kompetensi tersebut, penyuluh agama dapat dinyatakan kompeten jika mampu menjalankan tiga fungsi utama penyuluh, yaitu fungsi edukatif, fungsi konsultatif dan fungsi advokatif.

Fungsi edukatif menuntut seorang penyuluh untuk menjadi sosok yang memberikan pendidikan bagi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, seorang penyuluh hendaknya memiliki dasar ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan umum yang memadai serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Fungsi konsultatif menuntut seorang penyuluh agama untuk memberikan dan melayani konsultasi terkait persoalan agama dan kehidupan beragama, maupun persoalan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini, selain memiliki bekal pengetahuan yang luas, penyuluh sebagai konsultan tentunya harus menjadi sosok yang dipercaya dan diterima oleh masyarakat binaannya sehingga proses konsultasi berjalan baik dan menghasilkan alternatif solusi permasalahan.

Fungsi advokatif menuntut seorang penyuluh untuk memberikan bimbingan, saran dan nasihat terkait persoalan-persoalan agama, terutama yang berkaitan dengan hukum agama. Dari sejumlah kriteria tersebut, berikut gambaran jumlah penyuluh agama yang kompeten di Sulawesi Barat selama 5 tahun terakhir :

Tabel 5
Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi

Agama	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Islam	20	25	145	250	295	735
Kristen	6	6	6	6	6	30
Katolik	10	10	10	10	20	60
Hindu	15	20	25	30	40	130
Buddha	15	9	13	9	12	58
Khonghucu	0	0	0	0	0	0
TOTAL	66	70	199	305	373	1013

Sumber :Renstra 2015-2019 dan Laporan Capaian Kinerja

Tabel 6
Perbandingan Jumlah Penyuluh Agama dengan Jumlah Penduduk

	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Total
Jumlah Penduduk	1.251.278	232.377	17.515	27.278	900	-	1.529.348
Penyuluh PNS	150	29	6	1	-	-	186
Penyuluh Non PNS	446	170	45	40	4	-	705
Jumlah Penyuluh	596	199	51	41	4	-	891
Rasio per Agama	1 : 2.099	1 : 1.168	1 : 343	1 : 665	1 : 225		1 : 1.716

Sumber :Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka (KDA) Tahun 2019

Sampai dengan tahun 2019, jumlah penyuluh agama yang tersedia belum sebanding dengan jumlah umat yang dilayani. Ini ditunjukkan pada tabel diatas dimana 1 orang penyuluh agama harus melayani rata-rata sebanyak 1.716 umat beragama, sehingga Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat terus berkolaborasi dengan lembaga keagamaan dan ormas keagamaan, termasuk di dalamnya para tokoh agama dan pemuda lintas agama dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama.

Sebagai salah satu bentuk dan bukti peningkatan kompetensi penyuluh agama adalah diakuinya prestasi penyuluh di tingkat nasional, khususnya untuk penyuluh agama Islam.

Tabel 7
Prestasi Penyuluh Agama Islam

No	Nama	Kualifikasi	Prestasi	Tahun
1	Syamsul, S. Ag	PAI Fungsional	Juara 11 Nasional	2015
2	Dra. Nurhaedah	PAI Fungsional	Juara 7 Nasional	2017
3	Abd. Halim	PAI Fungsional	Juara 30 Nasional	2018
4	Sadikin, S. Pd. I	PAI Non PNS	Juara 25 Nasional	2018
5	Damalis, S. Ag	PAI Fungsional	Juara 20 Nasional	2019
6.	Syamsuddin, S. Sos	PAI Non PNS	Juara 15 Nasional	2019

Sumber : Bidang Bimas Islam Penais 2019

1.1.3.3 Kantor Urusan Agama (KUA) yang Memenuhi Standar

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan berkedudukan di kecamatan dan dipimpin oleh Kepala dengan tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

KUA Kecamatan merupakan ujung tombak layanan publik Kementerian Agama kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan KUA yang memenuhi standar pelayanan mutlak diperlukan. Selain diperlukan sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung layanan (PTSP), tidak kalah penting adalah diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki tanggungjawab, komitmen, integritas, inovasi dan keteladanan dalam mewujudkan peningkatan layanan kepada masyarakat.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sudah melakukan berbagai macam aksi kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM KUA Kecamatan, seperti :

- a. Deklarasi Integritas Layanan KUA;
- b. Penguatan Zona Integritas Kepala KUA;
- c. Penguatan Zona Integritas Penghulu;
- d. Penilaian KUA Percontohan/teladan;
- e. Pembinaan SDM Kepenghuluan;
- f. Survey pengendalian gratifikasi layanan nikah;
- g. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Administrasi layanan nikah;
- h. *Focus Group Discussion (FGD)* dan koordinasi tentang mutu layanan, bimbingan dan pemberdayaan KUA;

Dari upaya kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat memperoleh hasil yang cukup baik, dengan indikator positif :

- a. Nihil Aduan Masyarakat (Dumas) terhadap mal-administrasi serta penyimpangan layanan KUA Kecamatan;
- b. Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal sudah diterapkan di semua KUA Kecamatan;
- c. Maklumat Layanan sudah ditandatangani oleh Kepala KUA dan dipasang pada setiap KUA Kecamatan;
- d. Pakta Integritas sudah ditandatangani oleh semua Kepala KUA beserta Penghulu dan Staf KUA Kecamatan;
- e. Tidak ditemukan adanya pungutan biaya atas layanan nikah dan layanan administrasi lainnya di dalam KUA;

- f. Administrasi biaya nikah di luar KUA menggunakan Sistem Informasi PNBPN online dan penyetoran biayanya dilakukan oleh Calon Pengantin pada Bank Pemerintah/Swasta;
- g. Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) langsung diserahkan usai akad nikah;
- h. Hasil survei pengendalian gratifikasi kepada walinikah/pengantin, diperoleh informasi bahwa untuk nikah di KUA sudah tidak ada pungutan biaya dan untuk biaya nikah diluar kantor KUA sebesar Rp 600.000,-, (Enam Ratus Ribu Rupiah) calon pengantin/wali nikah setor langsung di bank serta tiada biaya tambahan di KUA;
- i. Layanan legalisasi dan duplikat nikah tidak dipungut biaya;
- j. Hasil Penilaian KUA Teladan Tingkat Nasional yang dalam kurun waktu 2015-2019 meraih Juara Teladan Nasional. Daftar Peraih Prestasi KUA Teladan dari Sulawesi Barat sebagai berikut :

Tabel 8
Lomba KUA Teladan Nasional

Tahun	Nama Kepala KUA	KUA	Prestasi
2015	Sumaila	KUA Kec. Alu	Juara 13
2016	Aladin, S. Ag	KUA Kec. Malunda	Juara 18
2018	Buhari, S. Ag	KUA Kec. Matakali	Juara 4
2019	Haris Nawawi, S. Ag., MA	KUA Kec. Binnuang	Juara 11

Sumber : Bidang Bimas Islam Pemberdayaan KUA 2019

Selama kurun waktu 2015-2019, Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan ditunjukkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9
Jumlah Kantor Urusan Agama yang Memenuhi Standar

Jumlah KUA Sulawesi Barat	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
63	5	12	18	20	25

Sumber : Renstra 2015-2019 dan Laporan Capaian Kinerja

1.1.3.4 Penghulu yang Kompeten

Secara historis keberadaan penghulu tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara menyeluruh. Perkembangan dan dinamika masyarakat sekaligus menjadi tenaga lapangan yang andal dalam mensukseskan visi dan misi Kementerian Agama khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah menuju masyarakat bahagia sejahtera dan makmur berkat ridho Allah SWT. Penghulu sebagai bagian dari pelayanan KUA yang bertugas dan bertatap muka langsung dengan masyarakat tentunya mempunyai kompetensi dibidang baca tulis Alquran, khutbah nikah, pembinaan keluarga sakinah, bimbingan perkawinan, memahami fikih munakahat, menurut Kepmen PAN & RB Nomor PER/62/M. PAN/6/2005 pasal 4 tugas penghulu adalah :

- Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan;
- Pengawasan pencatatan NR;
- Pelaksanaan pelayanan NR,
- Penasehatan dan konsultasi NR;
- Pemantauan pelanggaran ketentuan NR;
- Pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah;
- Pembinaan keluarga sakinah;
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan

Tabel 10

Jumlah Penghulu yang Memenuhi Kompetensi

Jumlah Penghulu	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
82	22	36	41	88	82

Sumber : Renstra 2015-2019 dan Laporan Capaian Kinerja

1.1.3.5 Kepuasan Layanan Jemaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi

Jumlah jemaah haji yang berangkat melalui Provinsi Sulawesi Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji merupakan kerjasama yang perlu ditingkatkan. Selama ini Provinsi Sulawesi Barat tergabung dalam Embarkasi UPG. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir indeks kepuasan jemaah haji baik selama di tanah air, di tanah suci mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11

Data Indeks Kepuasan Layanan Haji Nasional

Tahun				
2015	2016	2017	2018	2019
82,67	83,83	84,85	85,23	85,91

Sumber : BPS

Peningkatan indeks tersebut bukan tanpa usaha yang optimal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia, salah satunya melalui peningkatan kualitas bimbingan ibadah haji yang dilakukan dengan program sertifikasi bagi pembimbing ibadah haji, tujuan dari program ini dimaksudkan sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Selama ini bimbingan ibadah haji yang dijalankan dan dibiayai pemerintah dilaksanakan mendekati jadwal waktu keberangkatan ibadah haji, sehingga hasil dari kegiatan bimbingan ibadah haji tidak dapat maksimal, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mengatasi permasalahan bimbingan ibadah haji yang belum maksimal, dilakukan dengan menciptakan program unggulan “Manasik Mandiri Sepanjang Masa”, di KUA Kecamatan Se-Sulawesi Barat, dengan adanya program ini maka kebutuhan calon jemaah haji dengan waktu keberangkatan yang masih lama

ingin mendapatkan bimbingan ibadah dapat mengikuti kegiatan tersebut ditempat yang terjangkau, tidak dipungut biaya dan waktu yang tidak terbatas, selain dengan bimbingan ibadah haji secara tatap muka juga ditambah dengan adanya buku panduan bimbingan ibadah dan materi bimbingan ibadah yang disebarluaskan secara *online* dalam bentuk *softcopy*.

1.1.4 Peningkatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan

Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan lembaga keagamaan di Sulawesi Barat telah berperan besar dalam pembinaan keagamaan bagi umat beragama Islam di wilayah Sulawesi Barat yang berjumlah 1, 25 juta, Data salah satu jenis dana sosial keagamaan yang berupa zakat dan tanah wakaf menunjukkan bahwa potensi besaran dana sosial keagamaan ternyata cukup besar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12

Data Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Sulawesi Barat

No	Nama	Jumlah UPZ	Jumlah Perolehan	Ket.
1	BAZNAS Provinsi	39 UPZ	Rp. 601.048.000	
2	BAZNAS Mamuju	40 UPZ	Rp. 1.769.634.568	
3	BAZNAS Majene	77 UPZ	Rp. 3.958.561.244	
4	BAZNAS Polman	77 UPZ	Rp. 906.888.000	
5	BAZNAS Mateng	92 UPZ	Rp. 1.166.763.340	
6	BAZNAS Pasangkayu		Rp. 500.000.000	
7	Perwakilan LAZ Nasional BMH		Rp. 110.490.000	

Sumber : BAZNAS Sulawesi Barat Tahun 2020

Selain itu, Seksi Pemberdayaan Wakaf juga ikut mendorong terjadinya peningkatan potensi ekonomi keagamaan yang berupa pemberdayaan Tanah Wakaf yang ada di Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah tanah Wakaf di Sulawesi Barat sejumlah 2.750 lokasi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Harta Benda Wakaf berupa Tanah Sudah Bersertifikat : 1.061 lokasi;
 - b. Harta Benda Wakaf berupa Tanah belum Bersertifikat : 1.689 Lokasi.
2. Bantuan Sertifikasi Harta Benda Wakaf Berupa Tanah :
 - a. Mamuju : 11 Lokasi;
 - b. Majene : 9 Lokasi;
 - c. Polman : 16 Lokasi;
 - d. Mamasa : 8 Lokasi.
 - e. Pasangkayu : 12 Lokasi
 - f. Mamuju Tengah : 5 Lokasi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat selama ini telah berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan dana dan aset umat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat Islam, dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Audit Syariah dan Audit Keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat;
2. Publikasi dan Sosialisasi Kesadaran menunaikan Zakat pada BAZNAS dan Lembaga yang telah berizin melalui Baligho dan Media Sosial.

Selain itu, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam juga mendorong terjadinya peningkatan potensi dana keagamaan yang lainnya termasuk infaq dan sedekah sebagaimana yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an.

Melalui pembimas Katolik, skema ekonomi keagamaan berasal dari Kolekte, Stipendium, dan lura Stole yang dilakukan oleh setiap gereja didorong untuk ditingkatkan, selain pengumpulan dana Badan Amal Kasih Katolik (BAKAT).

Sementara itu, Pembimas Kristen mendorong Lembaga yang mengelola dana ekonomi keagamaan Kristen yaitu Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), Yayasan Sumbangan Sosial Keagamaan Kristen Indonesia (YASKI), dan Yayasan Kasih Persaudaraan Bangsa untuk ditingkatkan. Melalui Pembimas Hindu juga digali potensi ekonomi keagamaan yang berasal dari dana punia. Sementara pada agama Buddha, ekonomi keagamaan dapat bersumber dari Amisa Dana, Paricaya Dana, Abhaya Dana, dan Dhamma Dana. Untuk meningkatkan pendapatan dari potensi ekonomi keagamaan secara optimal, kebijakan pemberian insentif perlu dibuat.

1. 1. 5 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Pencapaian atas tujuan peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya kontribusi terhadap perolehan opini Laporan Keuangan, meningkatnya hasil evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja; (2) meningkatnya hasil penilaian Reformasi Birokrasi.

1.1.5.1 Kontribusi terhadap perolehan Opini Laporan Keuangan

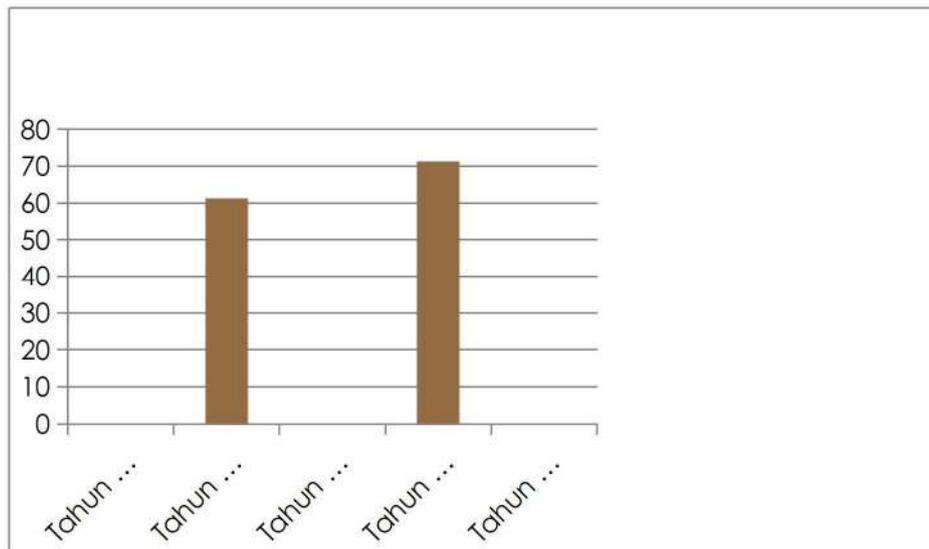
Dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) opini LKKA mengalami kenaikan. Pada awal tahun 2015 mendapatkan opini WDP dari BPK RI hingga sampai dengan saat ini mendapatkan opini WTP. Untuk tiga tahun terakhir ini (2016-2019), Kementerian Agama berhasil mempertahankan opini WTP. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan sudah bagus yang antara lain didukung oleh komitmen pimpinan dalam melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan dan didukung oleh kualitas pelaporan keuangan dari masing-masing satker Pusat dan Daerah. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mendukung pencapaian nilai opini Laporan Keuangan yang ditandai dengan perolehan (1) Selisih SAIBA dan

SIMAK; (2) Jumlah pagu minus yang yang tidak melebihi batas toleransi, dan (3) Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir penyajian Laporan Keuangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat telah menargetkan penyelesaian permasalahan pada Laporan Keuangan. Beberapa permasalahan yang menjadi target penyelesaian yakni percepatan pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut penyelesaian selisih antara SAIBA dan Simak BMN. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat selaku entitas Pemerintah Pusat yang menaungi 51 Satuan Kerja telah mengambil langkah dalam hal menyelesaikan permasalahan pada Laporan Keuangan berupa keseimbangan antara data SAIBA dan Simak BMN dan hasilnya tidak ditemukan selisih hingga akhir periode pelaporan tahun 2019.

1.1.5.2 Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Predikat evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2016 berhasil mencapai CC/Cukup Baik (61,25) dan meningkat di Tahun 2018 memperoleh predikat B/Baik (71,33). Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan. Perolehan akuntabilitas kinerja dipengaruhi oleh peningkatan nilai pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja.



Keterangan : Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dievaluasi pada tahun 2016 dan 2018

Gambar
Grafik : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Tahun 2015 s. d. 2019

Kenaikan nilai akuntabilitas kinerja tersebut menggambarkan terjadinya peningkatan pada :

1. Perencanaan Kinerja, dengan maksimal bobot nilai 30 %, untuk tahun 2016 dengan nilai 22,14% menjadi 25,83% di tahun 2018.

Hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah :

- a. Dokumen Renstra belum sepenuhnya selaras dengan Renstra Kementerian Agama;
 - b. Target dalam rencana aksi baru sebatas target tahunan, dan belum di breakdown secara teknis yang mendeskripsikan output dan outcome kegiatan disertai penanggung jawab dan time schedule rencana aksi;
 - c. Evaluasi rencana aksi belum dilakukan.
2. Pengukuran Kinerja, dengan maksimal bobot nilai 25 %, untuk tahun 2016 dengan nilai 16,88 % menjadi 17,05 % di tahun 2018.

Hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah :

- a. Ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya belum dibuat
 - b. Pedoman atau SOP terkait pengumpulan data kinerja hanya SOP Penyusunan LKj dan penyampaian LKj;
 - c. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas sebagai dasar pemberian reward & punishment masih di bawah 70%;
 - d. IKU telah dilakukan reviu namun tidak ditemukan dokumen Surat Keterangan telah direviu.
3. Pelaporan Kinerja, dengan maksimal bobot nilai 15%, untuk tahun 2016 dengan nilai 9,64 % menjadi 14,69% di tahun 2018.

Hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah :

- a. Laporan Kinerja belum sepenuhnya menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian kinerja *outcome* atau output penting;
 - b. Laporan Kinerja berisi sebatas informasi tentang efisiensi sumber daya yang dilakukan;
 - c. Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.
4. Evaluasi Internal, dengan maksimal bobot nilai 10%, untuk tahun 2016 dengan nilai 6,10% menjadi 6,24 % di tahun 2018.

Hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah :

- a. Hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi, namun belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjutnya;
- b. Pemantauan rencana aksi hanya sebatas pada isu utama saja;
- c. Evaluasi rencana aksi hanya dilakukan secara semester;
- d. Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti melalui forum rapat pimpinan namun baru mencapai 75%;

- e. Hasil tindak lanjut evaluasi rencana aksi belum menunjuk penanggung jawab dan waktu pelaksanaan.
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, dengan maksimal bobot nilai 20%, untuk tahun 2016 dengan nilai 6,50% menjadi 12% di tahun 2018.
- Hal yang harus diperhatikan untuk komponen ini adalah : Untuk meningkatkan Capaian Kinerja.

1.1.5.3 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan sejak tahun 2014, dimulai dari sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dan kemudian dilanjutkan dengan internalisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Pada awalnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat hanya melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Pusat, namun, pada tahun 2017 penilaian mandiri terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di beberapa satuan kerja Kementerian Agama mulai diimplementasikan. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya melalui perwujudan 8 (delapan) area perubahan yang ditetapkan dan ditandai dengan meningkatnya nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2018 sampai dengan 2019 melalui Aplikasi e-pokjab Kementerian Agama, yaitu : ditahun 2018 meraih nilai 58.55 dan ditahun 2019 dengan nilai 61.08.

Hal yang perlu dipahami bahwasannya bagian terpenting dalam pengukuran ketercapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu cara penilaian yang dilakukan adalah mengkuantifikasi kualitas ketercapaian, sehingga output yang dihasilkan adalah kualitas dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan bukan kuantitas (jumlah)

output yang dihasilkan. Sehingga pada akhirnya, penilaian reformasi birokrasi tidak hanya sekedar formalitas “*evidence based*” melainkan “*impact based*”.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak lepas dari pengejawantahan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Hukum dan Perundangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tata laksana, Penataan Sistem SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Nilai Indikator-indikator dari 8 (delapan) area perubahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin baiknya sistem tata Kelola pemerintahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam perjalanannya, penilaian mandiri Reformasi Birokrasi mengalami beberapa kali perubahan, terutama perubahan pada komposisi prosentasi penilaian di masing-masing indikator area perubahan, hal ini disebabkan adanya penambahan indikator di beberapa area perubahan.

1. Manajemen Perubahan

Didalam area perubahan Manajemen Perubahan, pada penilaian mandiri Reformasi Birokrasi ditahun 2018, terdapat 4 (empat) indikator dalam Manajemen Perubahan yaitu : pembentukan tim Reformasi Birokrasi, Implementasi Roadmap Reformasi Birokrasi, Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja, dengan total nilai capaian maksimal adalah 16. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan manajemen perubahan di tahun 2018 adalah Penetapan nilai-nilai Budaya Kerja Kementerian Agama dan menerapkan ASN Berbudaya Kerja (setiap tahun), penetapan *Agent of Change* di Kantor Wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Membangun RB-ZI corner sebagai *centre of excellence* dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang berfungsi sebagai : pusat edukasi dan literasi (mendukung *knowledge*

management), pusat Informasi (mendukung keterbukaan Informasi Publik) dan pusat komunikasi (mendukung perbaikan pelayanan publik). Pada tahun 2018, nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Manajemen Perubahan adalah 15,05 dari nilai total maksimal 16.

Di tahun 2018 dan 2019 semua kegiatan sudah berjalan lebih efektif, efisien dan terukur. Indikator dalam area perubahan Manajemen Perubahan berubah menjadi : Tim Reformasi Birokrasi, Agen Perubahan, Nilai-nilai organisasi, media komunikasi Reformasi Birokrasi dan Rencana Program Reformasi Birokrasi, dengan total nilai capaian maksimal adalah 12. Di tahun 2018 dan 2019, pemilihan Agen Perubahan sudah dilaksanakan secara online dan terpusat, yang mana pemilihan ini diikuti oleh seluruh pegawai dan Agen Perubahan terpilih mensosialisasikan rencana programnya pada acara pembinaan pegawai yang rutin dilaksanakan setiap awal bulan. Selanjutnya, Pencanaan dan sosialisasi budaya kerja positif Kementerian Agama sudah dilakukan dengan adanya komitmen Bersama untuk melakukan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dari Korupsi yang ditandatangani oleh seluruh pegawai, melakukan Internalisasi Budaya Kerja Positif Kementerian Agama kepada seluruh pegawai dalam bentuk kegiatan maupun media lainnya dengan kegiatan rutin apel pegawai serta pembinaan pegawai dan pengajian Bersama seluruh aparat dan pejabat pemerintah se-Sulawesi Barat. Dalam rangka mengedukasi seluruh pegawai dan stakeholder Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat seputar Reformasi Birokrasi, mulai tahun 2018 telah dilaksanakan Lomba dan sayembara terkait Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, mulai dari Lomba penulisan artikel, lomba membuat karikatur sampai dengan pembuatan film pendek, kegiatan ini mendorong internalisasi 8 area perubahan kepada masyarakat dan pegawai. Sehingga nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Manajemen

Perubahan ditahun 2019 adalah 6,53 dari nilai total maksimal 12, dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi telah diraih.

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT	NILAI	
			2018	2019
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	12%	5.05%	6.53%
INDEKS RB		12%	5.05%	6.53%

Hal-hal yang masih harus diperhatikan pada area perubahan ini adalah masih kurangnya motivasi tim kelompok kerja reformasi birokrasi dalam menjalankan ketugasannya dalam tim. Hal tersebut selain dikarenakan ketugasan dalam tim bukan merupakan tugas pokok dan fungsi kedinasannya, perlunya apresiasi khusus terhadap kerja tim kelompok kerja Reformasi Birokrasi oleh pimpinan. Dukungan anggaran terkait kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan Manajemen Perubahan perlu lebih ditingkatkan.

2. Penataan Hukum dan Perundang-undangan

Pada area perubahan Penataan Hukum dan Perundang-undangan pada tahun 2017, terdapat 3 (tiga) indikator yaitu harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Evaluasi Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Agama dan Membangun system pengendalian perundang-undangan pada Kementerian Agama dengan total nilai capaian maksimal adalah 4. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penataan Hukum dan Perundang-undangan di tahun 2017 adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat belum melakukan pemetaan dan dokumentasi yang memadai terhadap sebagian peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron serta Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangundangan belum dilakukan. Pada tahun 2019, nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penataan Hukum dan Perundang-undangan adalah 2,15 dari nilai total maksimal 5,50.

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT	NILAI	
			2018	2019
2	PENATAAN HUKUM DAN PERUNDANGAN	5.50%	2%	2.15%
INDEKS RB		6%	2.00%	2.15%

Di tahun 2018 dan 2019 semua kegiatan belum berjalan efektif, efisien dan terukur. Indikator dalam area perubahan Penataan Hukum dan Perundang-undangan berubah menjadi : Kepatuhan pelaksanaan regulasi, harmonisasi regulasi pada satuan kerja dan system pengendalian regulasi pada satuan kerja, dengan total capaian maksimal 5,5. Ditahun 2018 dan 2019, buku perundang-undangan sudah mulai disusun dibeberapa subbagian dan bidang seperti buku perundang-undangan kepegawaian dan buku perundang-undangan Pengadaan Barjas (barang dan jasa), kajian dan analisis terhadap perundang-undangan sudah dilakukan oleh Analis kebijakan ditahun 2019 dan sudah ada evaluasi terkait pelaksanaan aturan dan kebijakan Pendidikan (BOS, TPG dan lain sebagainya). Saat ini, proses penyusunan *digital library* terkait perundang-undangan sedang dilakukan, dan diharapkan Di akhir tahun 2020, *e-library* terkait perundang-undangan sudah dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai dan masyarakat. Sehingga nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penataan Perundang-undangan ditahun 2019 adalah 2,15 dari nilai total maksimal 5. 50, hal ini menunjukkan nilai yang belum sempurna dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi di area perubahan ini telah diraih.

Hal-hal yang masih perlu diperbaiki dalam hal ini adalah perlunya sistem informasi satu pintu terhadap dokumentasi peraturan perundang-undangan seluruh unit kerja di Subbagian Hukum dan Kepegawaian sehingga dapat sistematis dan terpantau. Selain itu, perencanaan terhadap monitoring dan evaluasi perundang-undangan, sosialisasi dan kajian rutin terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru terbit di seluruh bidang dan unit kerja perlu mendapat perhatian khusus.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Area Perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi di tahun 2017 tidak dilakukan penilaian dengan pertimbangan penataan dan penguatan organisasi merupakan kewenangan Pusat. Sehingga capaian maksimal di area perubahan ini adalah 0. Ditahun 2017, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melakukan fasilitasi dalam area ini dengan melakukan beberapa hal diantaranya adalah penetapan penataan organisasi baik di Kantor Wilayah, Kementerian Agama Kabupaten hingga madrasah dan KUA serta penetapan lebih dari 1500 uraian jabatan. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap hasil analisis jabatan dan beban kerja pegawai. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat juga mengusulkan kepada Biro Ortala Kementerian Agama RI terkait dengan penyempurnaan nama jabatan, tugas, dan fungsi dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Pada tahun 2018 dan 2019, Penilaian area perubahan Penataan dan Penguatan Organisasi dinilai melalui 2 (dua) indikator yaitu evaluasi organisasi dan analisis jabatan dengan total maksimal nilai capaian adalah 4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat masih melakukan hal yang sama yaitu terkait usulan dan kajian PMA 19 tahun 2019 terkait Organisasi Tata Kerja Instansi (Vertikal) pada Kementerian Agama yang baru. Peta jabatan sudah disusun, Analisa jabatan untuk masing-masing pegawai juga sudah dibuat, namun masih sebatas pegawai dengan jabatan fungsional umum saja dan sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait hal tersebut. Nilai yang dicapai dalam penilaian mandiri pada area perubahan ini ditahun 2019 adalah 1,18 dari nilai total

maksimal 4, hal ini menunjukkan nilai belum sempurna dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi di area perubahan ini telah diraih.

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT	NILAI	
			2018	2019
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	4%	1.15%	1.18%
INDEKS RB		4%	1.15%	1.18%

Adapun hal yang harus diperhatikan adalah masih perlunya kajian-kajian terinci terkait organisasi yang *right sizing* dan *right function* yang berdasarkan aturan-aturan yang berlaku serta rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti dan segera diambil Langkah untuk perbaikan di masa yang akan datang, misalnya : kajian terkait urgensi jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Penguatan Tata Laksana

Pada tahun 2018, penilaian mandiri di area perubahan Penguatan tata laksana terdapat 3 (tiga) indikator yaitu Evaluasi dan perbaikan peta proses bisnis dan SOP untuk mendukung operasional Kementerian Agama, Keterbukaan Informasi Publik dan Penerapan *e-government* dengan total nilai capaian maksimal adalah 12. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan tata laksana di tahun 2018 adalah dilaksanakannya kegiatan penyusunan draft Peta Proses Bisnis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, namun belum melalui koordinasi dan pembahasan lebih lanjut baik ditingkat kantor wilayah sampai dengan kabupaten/kota. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat telah menetapkan 642 SOP untuk Kantor Wilayah dan 187 untuk kantor Kementerian Agama serta 36

SOP. layanan unggulan, pengembangan *e-government*, antara lain : e-PTSP, e-REKOM, *e-learning*, e-kinerja, e-RPD, e-Perjadin (perjalanan dinas dan surat tugas) dan *e-library* (perundang-undangan). Penyusunan SOP yang ada belum seluruhnya diselaraskan dengan proses bisnis yang baru ditetapkan dan SOP belum dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, efektivitas birokrasi serta belum dilakukan evaluasi secara berkala. Sistem Informasi digital atau *e-government* sudah mulai dikembangkan dan diimplementasikan. Namun, karena satu dan lain hal, *e-government* belum dapat diintegrasikan baik ditingkat Kantor Wilayah maupun tingkat kab/kota. Pada tahun 2019, nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penguatan Tata Laksana adalah 7,73 dari nilai total maksimal 16.

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT	NILAI	
			2018	2019
4	PENGUATAN TATA LAKSANA	16%	7.45%	7.73%
INDEKS RB		16%	7.45%	7.73%

Area Perubahan Penataan tata laksana ditahun 2018 dan 2019 mempunyai 5 (lima) indikator penilaian yaitu Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur, Pengelolaan kearsipan, Keterbukaan informasi publik, *e-government* dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan total nilai capaian maksimal 16. Pada tahun 2018 dan 2019, SOP telah dilakukan evaluasi dan disinkronkan dengan peta proses bisnis yang memang baru disusun ditahun 2018. Pengelolaan kearsipan dapat lebih tertib karena didukung oleh JFT Arsiparis dalam pelaksanaannya. Keterbukaan Informasi Publik sudah mulai berjalan efektif dan optimal selain karena adanya peran pranata humas dalam

menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi public yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan terkait dengan pelayanan dan kinerja Kementerian Agama. Setelah ditahun 2017, *e-government* menjadi titik tolak digitalisasi pelayanan baik pelayanan masyarakat eksternal maupun pelayanan administrasi internal, tindak lanjut *e-government* di tahun 2018 adalah mengoptimalkan beberapa system informasi aplikasi terkait kinerja pegawai dan beberapa system aplikasi lainnya. Implementasi dan evaluasi penggunaan LPSE sudah dilakukan untuk Pengadaan pembangunan Gedung Asrama siswa Madrasah Negeri (MTsN/MAN) dan KUA ditahun 2018 dan 2019.

Beberapa hal yang masih perlu diperhatikan di area perubahan ini adalah perlu adanya sinkronisasi peta proses bisnis dan SOP dengan jabatan pelaksana yang terbaru (PMA Nomor 19 Tahun 2019) dan dimonitor serta dievaluasi secara berkala, digitalisasi kearsipan yang memadai dan perlunya ruang arsip yang memadai untuk arsip seluruh unit kerja satu atap Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, perlu adanya SK *MORACyber team* untuk lebih melugaskan peran *MORACyber team* dalam ketugasannya, *e-government* perlu dikembangkan lebih lanjut dan mengintegrasikannya dengan sistem informasi/aplikasi lainnya baik dari pusat, pemerintah daerah atau *stakeholder* lainnya, maupun pegawai.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Pada tahun 2018, penilaian mandiri di area perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur terdapat 7 (tujuh) indikator yaitu :
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi,

Proses penerimaan dan promosi pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Penetapan kinerja individu, Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, Pelaksanaan evaluasi jabatan dan Sistem Informasi Kepegawaian. Adapun Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur di tahun 2018 adalah melalui kegiatan perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi, Assesmen telah dilakukan terhadap sebagian besar pejabat. Namun, disisi lain belum dilakukannya monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi serta pelaksanaan penilaian kinerja individu masih terbatas pada pemenuhan target dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan belum dikaitkan dengan kinerja organisasi. Selain itu, belum dilakukannya monitoring dan evaluasi terkait capaian kinerja individu yang belum dijadikan dasar sebagai pembayaran tunjangan kinerja. Terakhir adalah Pemberian sanksi (punishmen) dan imbalan (*reward*) baru dilaksanakan di beberapa program. Sehingga nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penataan Sistem manajemen SDM aparatur di tahun 2019 adalah 17,55 dari nilai total maksimal 25.

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT	NILAI	
			2018	2019
5	PENATAAN SISTEM SDM APARATUR	25%	17.30%	17.55%
INDEKS RB		25%	17.30%	17.55%

Ditahun 2018 dan 2019, area perubahan penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur memiliki 8 (delapan) indikator penilaian yaitu

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Pegawai, Pengadaan Pegawai, Pangkat dan Jabatan, Pengembangan Karir, Pengembangan Kompetensi dan Sistem Informasi Manajemen Karir, Penilaian kinerja dan disiplin, penghargaan, Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan serta Sistem Informasi Kepegawaian. Total nilai capaian maksimal ke 8 (delapan) indikator tersebut adalah 25. Hasil capaian dari implementasi penataan Sistem manajemen SDM Aparatur di tahun 2018 dan 2019 meliputi kegiatan penyusunan rencana kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS pada satker berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai dengan mempertimbangkan dinamika/perkembangan organisasi. Selanjutnya, dilakukan penyusunan rencana kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan Renstra Kementerian Agama serta pemetaan dan klasifikasi pegawai berdasarkan kedudukan jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dan ditindak lanjuti di area perubahan ini adalah perlu disusun dokumen pengembangan karir dan Analisa kebutuhan diklat pegawai serta sosialisasi kebutuhan diklat kepada seluruh pegawai sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, melakukan proses penerimaan pegawai Non PNS secara transparan melalui satu pintu sehingga kebutuhan pegawai non PNS dapat dipantau termasuk alokasi anggaran terhadap pegawai Non PNS. Dalam hal system

informasi kepegawaian, perlu Membangun Sistem Informasi Manajemen Karier PNS dan sinkronisasi e-kinerja Kantor Wilayah dengan system absensi sehingga dapat terintegrasi dan terukur.

6. Penguatan Akuntabilitas

Pada tahun 2018, penilaian mandiri di area perubahan Penguatan Akuntabilitas terdapat 2 (dua) indikator yaitu keterlibatan pimpinan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan akuntabilitas di tahun 2018 adalah kontrak kinerja bagi seluruh pejabat dan pegawai melalui perjanjian kinerja telah disusun dan kontrak kerja serta pembangunan sistem e-kinerja sudah mulai diimplementasikan yang nantinya diharapkan akan terintegrasi dengan SIMPEG. Penilaian LAKIP untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat adalah 61,25 dengan predikat B (baik). Keterlibatan pimpinan sudah optimal pada saat penyusunan renstra dan perjanjian kinerja ditandai dengan keterlibatan secara langsung dalam melakukan pemantauan kinerja secara berkala. Upaya peningkatan kapasitas SDM dibidang Akuntabilitas Kinerja oleh unit kerja belum dilakukan secara optimal. Sistem Pengukuran Kinerja yang berbasis elektronik (e-kinerja) mulai diimplementasikan tahun 2017. Nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penguatan Akuntabilitas di tahun 2019 adalah 10,48 dari nilai total maksimal 15.

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT	NILAI	
			2018	2019
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	15%	10.35%	10.48%
INDEKS RB		15%	10.35%	10.48%

Di tahun 2018 dan 2019, area perubahan penguatan Akuntabilitas memiliki 6 (enam) indikator penilaian yaitu Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal serta capaian kinerja. Hasil capaian dari implementasi penguatan akuntabilitas di tahun 2018 dan 2019 sudah semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan sudah digunakannya dokumen Renstra sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja dan dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan melibatkan pimpinan. Rencana kinerja tahunan sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja pimpinan dan dipublikasikan di *website* agar diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat sebagai bagian dari janji pelayanan. Pengejawantahan Perjanjian Kinerja ke lini bawah melalui sasaran kerja pegawai dan penilaian target kinerja pegawai telah dilakukan melalui sistem informasi/aplikasi e-kinerja sehingga dapat terukur. Laporan kinerja sudah dilakukan melalui Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA) yang capaiannya dilaporkan secara triwulan melalui aplikasi tersebut. Sehingga nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan akuntabilitas ditahun 2019 adalah 10,48 dari nilai total maksimal 15,00 dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi di area perubahan ini telah diraih.

Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam area perubahan ini adalah perlunya diklat yang berkesinambungan terhadap pegawai yang baru menjalankan tugas fungsi penyusunan laporan kinerja.

7. Penguatan pengawasan

Pada tahun 2018, penilaian mandiri di area perubahan Penguatan Pengawasan terdapat 6 (enam) indikator yaitu Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, *Whistle Blowing System*, Penanganan Benturan Kepentingan dan Pembangunan Zona Integritas. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan pengawasan di tahun 2018 meliputi Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat telah menetapkan kebijakan secara formal tim penanganan gratifikasi, SPIP, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan. Namun, disisi lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat belum melakukan evaluasi kebijakan secara berkala terhadap penangan gratifikasi, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system* dan penanganan benturan kepentingan. Nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penguatan Pengawasan di tahun 2019 adalah 7,10 dari nilai total maksimal 10,00.

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT	NILAI	
			2018	2019
7	PENGUATAN PENGAWASAN	10%	7%	7.10%
INDEKS RB		10%	7.00%	7.10%

Di tahun 2018 dan 2019, area perubahan penguatan Pengawasan memiliki 3 (tiga) indikator penilaian yaitu Penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), SPIP, Dumas/WBS, ZI-WBK-WBBM serta layanan publik; Optimalisasi satuan kerja dalam meningkatkan kepatuhan pengelolaan keuangan negara serta Tindak lanjut hasil pengawasan (TLHP).

Hal-hal yang perlu diperbaiki dalam area perubahan ini adalah perlu kejelasan kewenangan tim terkait prosedur penanganan Gratifikasi, Benturan Kepentingan (*conflict of interest*), SPIP dan Dumas/WBS. Penguatan tim SPIP perlu lebih ditekankan dan dibina melalui pelatihan-pelatihan yang intensif dengan Lembaga pembina SPI. Diatas itu semua, perlu komitmen kuat dari pimpinan dalam mengimplementasikan area perubahan penguatan pengawasan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

8. Penguatan Kualitas Layanan Publik

Pada tahun 2018, penilaian mandiri di area perubahan Penguatan Pengawasan terdapat 6 (enam) indikator yaitu standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan layanan publik unggulan. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan Kualitas Layanan Publik di tahun 2018 meliputi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik secara umum terdapat kemajuan dalam pemberian pelayanan publik terutama yang berbasis *online*, baik website maupun android dan survei pelayanan publik sudah dilakukan pada unit-unit pelayanan seperti KUA, Haji dan Madrasah. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti standar pelayanan belum seluruhnya dimaklumkan terutama pada pelayanan *online*, Reviu dan revisi SOP pelayanan tidak dilakukan secara berkala, tetapi tergantung kebutuhan, sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima baru sebatas pelatihan internal, belum banyak

melibatkan pihak eksternal yang ahli dalam bidang pelayanan serta belum terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Nilai capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penguatan Kualitas Layanan Publik di tahun 2019 adalah 8,38 dari nilai total maksimal 12,50.

NO	AREA PERUBAHAN	BOBOT	NILAI	
			2018	2019
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	12.50%	8.25%	8.38%
INDEKS RB		13%	8.25%	8.38%

Di tahun 2018 dan 2019, area perubahan penguatan Pengawasan memiliki 6 (enam) indikator penilaian yaitu standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan layanan publik unggulan dan program prioritas. Hasil evaluasi capaian Reformasi Birokrasi pada area perubahan penguatan Kualitas Layanan Publik di tahun 2018 dan 2019 meliputi penyusunan standar layanan di PTSP sudah dilakukan, budaya pelayanan prima sudah dibangun, sudah dibuat survei terkait kepuasan masyarakat di layanan PTSP, dan pemanfaatan teknologi informasi sudah dilakukan dengan adanya e-PTSP (atau PTSP online). Sehingga Hasil capaian dari implementasi peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah 8,38 dari nilai maksimal 12,50 di tahun 2019.

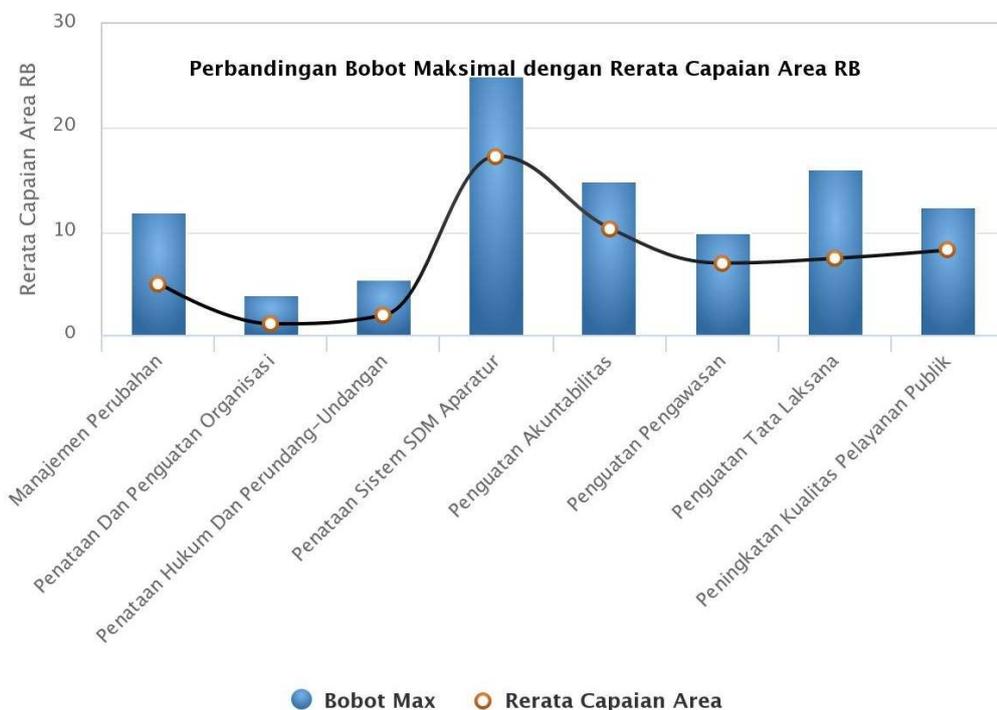
Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus di area perubahan ini adalah : sarana dan prasarana pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat belum lengkap,

seperti belum adanya ruang konsultasi, ruang bermain anak-anak. Selain itu, kompensasi terhadap pelayanan belum terukur dan didefinisikan secara jelas. Lebih lanjut lagi, pengelolaan pengaduan terhadap layanan belum dituangkan dalam suatu prosedur/juknis yang rinci.

Grafik Rerata capaian Area Perubahan RB

Kantor Wilayah Kementerian Agama tahun 2018 dan 2019

Rekapitulasi Rerata Capaian Area Perubahan RB Tahun 2018



Highcharts.com

Rekapitulasi Rerata Capaian Area Perubahan RB Tahun 2019



Highcharts.com

Dengan kontribusi 51 satuan kerja, peningkatan nilai tersebut di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Agama telah dilakukan secara masif. Hal ini dapat dilakukan karena pada tahun 2019, beberapa Kantor Kementerian Agama kabupaten mulai mengintegrasikan sistem aplikasi, data, dan informasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, juga dilakukan pengembangan sarana dan prasarana terdiri dari tampilan gedung, ruang kantor, dan tata ruang pelayanan publik, agar lebih memberi rasa nyaman, aman, dan ramah. Telah dibentuk unit PTSP di Kantor wilayah dan seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten. Ini didukung dengan pengembangan SDM melalui penguatan sistem pengelolaan data dan informasi kepegawaian serta penempatannya berdasarkan sistem meritokrasi (kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar).



Grafik : Penilaian Reformasi Birokrasi dari Tahun 2015 s. d. 2019

Tahun	Hasll Penilaian Reformasi Birokrasi
2015	Belum ada penilaian
2016	Belum ada penilaian
2017	Belum ada penilaian
2018	58,55
2019	61,08

Tabel : Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dari Tahun 2015 s. d. 2019

1.1.6 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berupaya untuk terus membuka akses pendidikan bagi seluruh masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Barat, baik melalui lembaga pendidikan umum berciri khas agama maupun lembaga pendidikan keagamaan yang menjadi mitra Kementerian Agama, sedang indikator dari sasaran tersebut antara lain :1. APK RA/Pratama Widya Pasraman; 2. APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 3. APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman; 4. APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman; 5. APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman; 6. APM MTs/Wustha/SMPTK; 7. APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Mengacu pada Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SMP, SMA dan SMK, maka batas usia paling rendah masuk SD adalah 6 (enam) tahun, jenjang SMP paling tinggi usia 15 tahun dan SMA/SMK paling tinggi usia 21 tahun, maka APK pada jenjang MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman di Sulawesi Barat terhadap jumlah penduduk Sulawesi Barat pada usia 6 – 13 tahun.

APK pada jenjang MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman di Sulawesi Barat terhadap jumlah penduduk Sulawesi Barat pada usia 12 – 15 tahun.

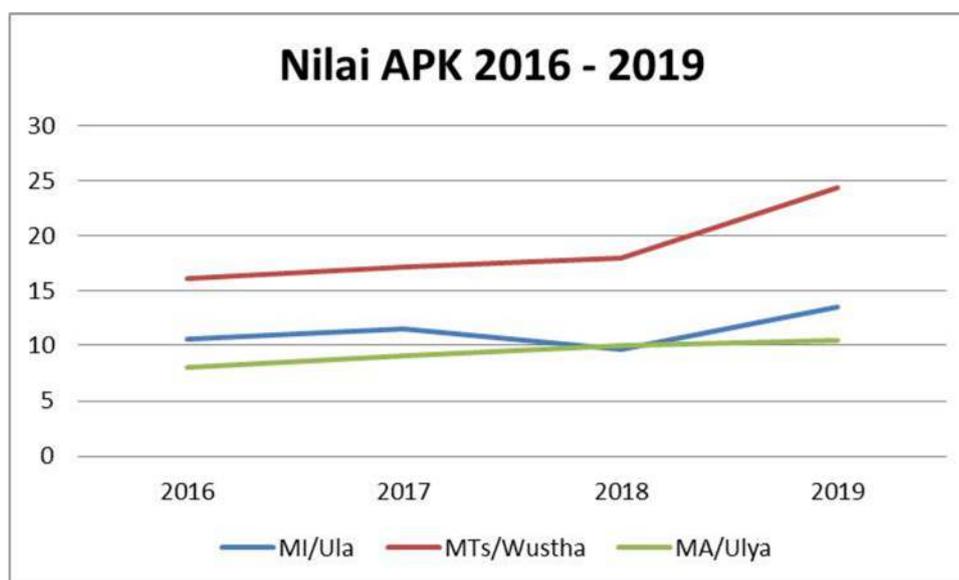
APK pada jenjang MA/Ulya/SMATK/Utama Widya Pasraman adalah rasio peserta didik pada MA/Ulya/SMATK/Utama Widya Pasraman di Sulawesi Barat terhadap jumlah penduduk Sulawesi Barat pada usia 15 – 21 tahun.

Semakin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah. Hal ini bermanfaat untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 10
Angka Partisipasi Kasar (APK)

Lembaga Pendidikan	2016		2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
MI/Ula	9,50	10,54	11,00	11,55	12,00	9,64	13,00	13,43
MTs/Wustha	15,00	16,11	16,30	17,21	20,00	18,03	22,00	24,36
MA/Ulya	7,00	8,02	8,30	9,02	9,30	10,03	13,00	10,48

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2019



Dari tabel 14 dan grafik yang tergambar, dapat dilihat bahwa pada dasarnya untuk jenjang MI/Ula, APK Sulawesi Barat selalu berhasil mencapai target pada tiap tahunnya. Sedangkan pada jenjang MTs, capaian APK pada tahun 2018 dan 2019

tidak memenuhi target. Hal ini tidak serta merta dimaknai sebagai penurunan minat dan animo masyarakat terhadap MTs maupun partisipasinya dalam program kesetaraan jenjang Wustha. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah peserta didik di MTs serta Program Kesetaraan jenjang Wustha pada 5 tahun terakhir. Ketidakberhasilan pencapaian target pada dua tahun terakhir tersebut dapat mengindikasikan bahwa penambahan jumlah peserta didik pada MTs/Wustha belum dapat mengimbangi penambahan jumlah penduduk pada jenjang usia MTs/Wustha dalam kurun waktu tahun 2018-2019.

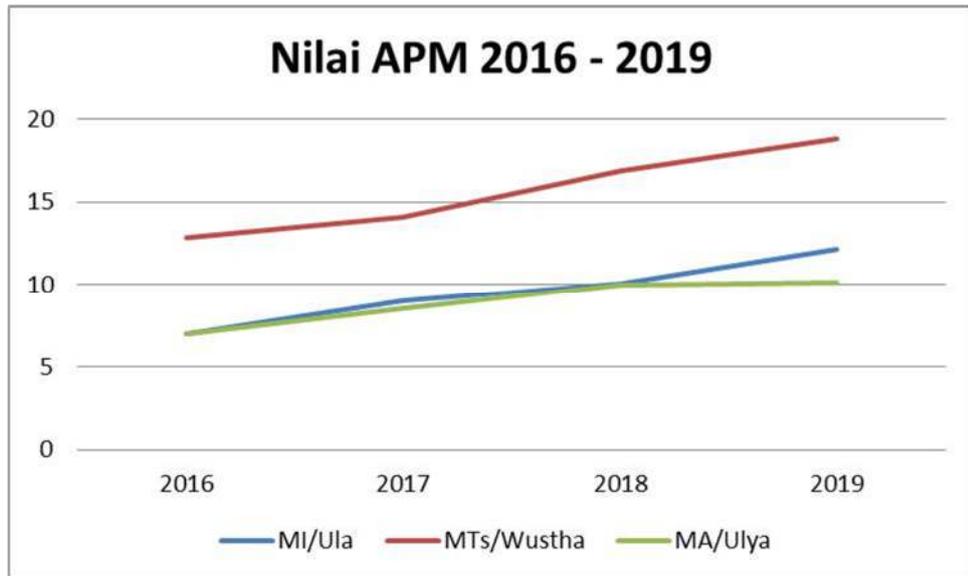
Pada jenjang MA/Ulya, dalam 4 (empat) tahun terakhir capaian APK Provinsi Sulawesi Barat dari tahun 2016 – 2019 tidak dapat memenuhi angka target dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat periode 2015-2019. Pada sisi lain, jumlah siswa MA dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini memberikan indikasi bahwa penentuan angka target APK untuk jenjang MA/Ulya cenderung *over estimate*, sehingga dalam 5 tahun terakhir target tidak terpenuhi. Namun demikian, terdapat kecenderungan capaian APK meningkat dari tahun ke tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.

Tabel 11
Angka Partisipasi Murni (APM)

Lembaga Pendidikan	2016		2017		2018		2019	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
MI/Ula	6,00	6,96	8,00	8,99	10,00	10,09	11,00	12,12
MTs/Wustha	12,00	12,89	14,00	14,09	16,00	16,91	18,00	18,82
MA/Ulya	6,30	6,98	8,00	8,50	9,00	9,99	11,00	10,14

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2019



Dari tabel 15 dan grafik yang tergambar, dapat dilihat bahwa pada dasarnya untuk jenjang MI/Ula, APM Provinsi Sulawesi Barat selalu berhasil mencapai target pada tiap tahunnya. Sedangkan untuk jenjang MTs terdapat fluktuasi capaian APM dalam 5 tahun terakhir, namun secara umum belum dapat memenuhi target. Demikian juga untuk APM jenjang MA. Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan *over estimate* dalam menetapkan angka target dalam RENSTRA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2019.

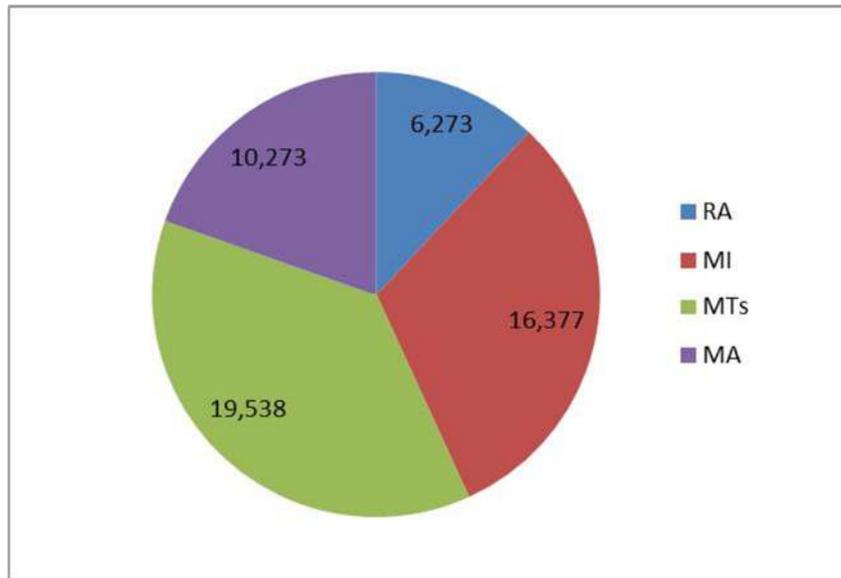
Adapun data lembaga pendidikan yang terdapat di lingkungan kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

Tabel 12

Jumlah Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Sulawesi Barat

No	Jenis	Unit Kerja Pengampu	Lembaga Pendidikan	Jumlah Lembaga Pendidikan	Jumlah Peserta Didik	
1	Pendidikan Umum berciri khas agama	Bidang Pendidikan Madrasah	RA	139	6.273	
			MI	162	16.377	
			MTs	164	19.538	
			MA	93	10.273	
2	Pendidikan Keagamaan	Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam	Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula	7	245	
			Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Wustha	10	1.637	
			Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ulya	4	593	
		Bimbingan Masyarakat Kristen	SDTK	0	0	
			SMPTK	0	0	
			SMTK/SMAK	2	156	
		Bimbingan Masyarakat Katholik	TK Katolik	7	194	
			SDK	0	0	
			SMPK	2	383	
			SMA/K Katolik	1	101	
			Bimbingan Masyarakat Hindu	Pratama Widya Pasraman	0	0
				TK Sari Mekar	0	0

Sumber :Kementerian Agama Dalam Angka (KDA) Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat Tahun 2019



Berdasarkan grafik peserta didik RA, MI, MTs, MA diatas dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah peserta didik selalu meningkat hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat melalui lembaga pendidikan yang dimilikinya telah membuka akses pendidikan bagi masyarakat sesuai jenjang usia. Dan pada sisi lain, data tersebut juga menunjukkan animo masyarakat terhadap lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat semakin tinggi. Hal ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan umum berciri khas agama telah menjadi pilihan bagi masyarakat.

Upaya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat juga dilakukan dengan pemberian bantuan untuk pengembangan lembaga pendidikan. Berbagai bantuan yang disalurkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi lembaga pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir antara lain : Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi MI, MTS, MA, Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula, Wustha dan Ulya, SD, SMP dan SMAK Agama Kristen. Data alokasi anggaran BOP bagi Raudhatul Athfal dan BOS untuk

lembaga pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

Tabel 13

Jumlah Alokasi Bantuan Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah bagi Lembaga Pendidikan Umum berciri khas agama dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

No	Jenis Lembaga	Agama	Jenis Bantuan	Lembaga Pendidikan	2015 (siswa)	2016 (siswa)	2017 (siswa)	2018 (siswa)	2019 (siswa)
1	Pendidikan Umum berciri khas agama	Islam	BOP	RA	5,664	6,302	6,464	6,273	6,055
			BOS	MI	14,617	15,855	14,938	16,377	16,252
			BOS	MTs	16,694	18,085	18,57	19,538	18,301
			BOS	MA	8.170	8.370	8,892	10,273	8,583
		Kristen	BOS	SDTK	0	0	0	0	0
			BOS	SMPTK	0	0	0	0	0
			BOS	SMTK	-	122	148	152	156
2	Pendidikan Keagamaan	Islam	BOS	Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ula	634	634	194	205	275
			BOS	Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Wustha	950	1.055	836	827	827
			BOS	Pendidikan Muadalah/Diniyah Formal Tingkat Ulya	-	50	255	100	300

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam Tahun 2019

Kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat juga dapat dilihat dalam penyaluran anggaran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada tahun 2015 yang kemudian berubah menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun-tahun berikutnya.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, anggaran BSM/PIP bagi siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dialokasikan oleh Kementerian Agama RI melalui Provinsi Sulawesi Barat untuk didistribusikan kepada satker penyalur yaitu Madrasah Negeri dan Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/Kota. Namun pada tahun 2018, anggaran PIP untuk siswa madrasah dan santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan beberapa pertimbangan hasil evaluasi dari pengelolaan PIP bagi santri pada tahun 2018, tahun 2019 anggaran PIP bagi santri pada satuan pendidikan muadalah/diniyah formal kembali dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 14
Data Siswa Madrasah Penerima BSM//PIP

No	Jenjang	Jumlah Penerima BSM Th 2015 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2016 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2017 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2018 (siswa/santri)	Jumlah Penerima PIP Th 2019 (siswa/santri)
1	MI	6.115	6.866	7.357	8.505	4.409
2	MTs	3.891	4.119	5.651	5.794	5.463
3	MA	1.420	1.981	2.120	2.355	2.567
4	Ula	85	227	327	170	160
5	Wustha	557	423	423	947	1010
6	Ulya	319	91	91	260	290

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah dan Bidang PAKIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat Tahun 2015-2019

Selain peningkatan akses pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat juga berkontribusi dalam peningkatan akses masyarakat, khususnya kalangan santri untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk seleksi beasiswa bagi santri berprestasi untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

Dalam program tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menjalankan perannya dengan melakukan sosialisasi program serta penyelenggaraan seleksi bagi calon penerima beasiswa. Data kelulusan seleksi calon peserta PBSB di Sulawesi Barat pada tahun 2015 s. d. 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Data Kelulusan Seleksi Calon Peserta PBSB
Tahun 2015 s. d. 2019

NO	PERGURUAN TINGGI MITRA	2015	2016	2017	2018	2019
1	UIN SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA					
	- Pondok Pesantren Syech Hasan Yamani	0	0	1	0	0
	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA					
	- Pondok Pesantren Nuhiyah Pambusuang	0	1	0	1	0
	- Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin DDI Baruga	0	0	0	0	1
TOTAL		0	1	1	1	1

Sumber : Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Tahun 2015-2019

Data dalam tabel tersebut menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah santri Sulawesi Barat yang lulus dalam program Seleksi Beasiswa Santri Berprestasi. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan akses bagi santri Sulawesi Barat untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi melalui fasilitasi Kementerian Agama.

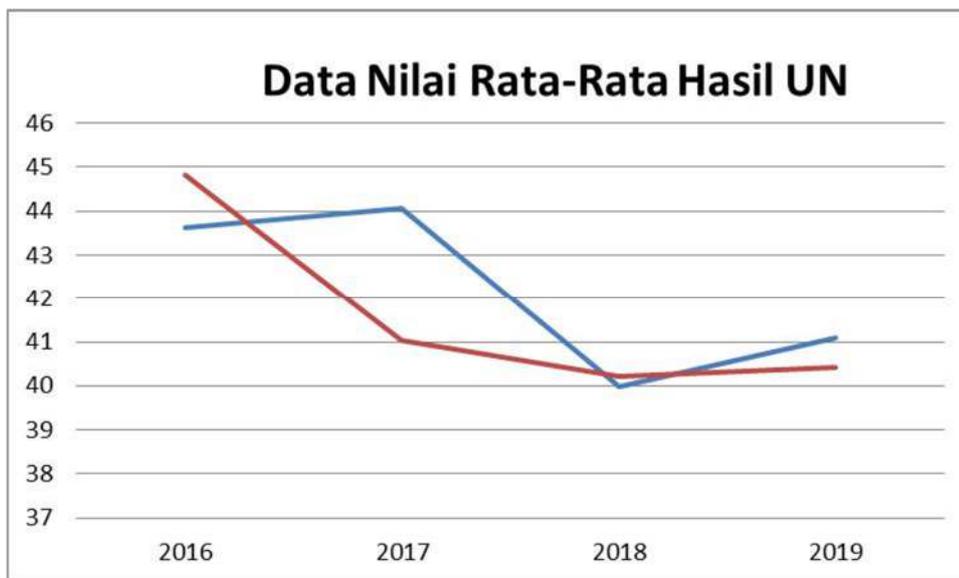
1.1.7 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Dalam rangka mengevaluasi kualitas pembelajaran pada lembaga pendidikan umum berciri khas agama, penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat berupaya konsisten dalam mengawal penyelenggaraan evaluasi proses pembelajaran di madrasah maupun penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum melalui Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembelajaran di madrasah dapat dilihat dari nilai rata-rata ujian nasional sebagai berikut :

Tabel 16
Data Nilai Rata-Rata Hasil UN

Rerata Nilai UN	2016	2017	2018	2019
MTs	43,62	44,06	39,97	41,09
MA	44,83	41,04	40,22	40,43

Sumber : Bidang Pendidikan Madrasah Tahun 2016-2019



Hasil Ujian Nasional siswa madrasah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan. Peningkatan nilai rata-rata ujian pada siswa madrasah dipengaruhi oleh adanya dukungan sarana prasarana madrasah yang semakin meningkat, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru serta semakin bertambahnya usaha peningkatan kompetensi siswa melalui berbagai bentuk kegiatan. Hal ini memperkuat bukti adanya peningkatan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan umum berciri khas agama yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.

Pada sisi lain, evaluasi pembelajaran agama di lembaga pendidikan formal/sekolah umum dilakukan salah satunya melalui Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) Pendidikan Agama. Capaian nilai rata-rata USBN Pendidikan Agama tahun 2015 s.d. 2019 adalah sebagai berikut

Tabel 17

Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Islam Tahun 2015 s. d. 2019

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	78	79	80	80
2	2016	80	80	82	82
3	2017	82	82	83	84
4	2018	85	85	85	85
5	2019	87	87	86	87

Sumber : Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Th 2015-2019

Tabel 18**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Kristen Tahun 2015 s. d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	76,78	79,09	80,81	81,57
2	2016	77,09	83,27	81,07	82,98
3	2017	79,32	83,64	81,46	83,4
4	2018	80,29	84,47	81,04	82,82
5	2019	82,41	85,29	82,25	82,7

Sumber : Bimas Kristen Tahun 2015-2019

Tabel 19**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Katolik Tahun 2015 s. d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	80,60	74,00	60,80	52,20
2	2016	79,28	77,58	65,15	57,45
3	2017	80,15	90,10	90,00	75,50
3	2018	85,45	93,15	90,20	80,20
3	2019	92,20	95,00	90,10	90,10

Sumber : Bimas Katolik Tahun 2015-2019

Tabel 20**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Hindu Tahun 2015 s. d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	76,20	77,70	79,10	78,50
2	2016	74,82	83,16	75,95	69,11
3	2017	69,45	76,18	75,83	68,13
4	2018	71,12	74,62	76,50	69,97
5	2019	72,57	76,97	73,43	68,15

Sumber : Bimas Hindu Tahun 2015-2019

Tabel 21**Nilai Rata-Rata USBN Pendidikan Agama Buddha Tahun 2015 s. d. 2019**

NO	TAHUN	JENJANG/NILAI RATA-RATA			
		SD	SMP	SMA	SMK
1	2015	76,20	77,70	79,10	78,50
2	2016	74,82	83,18	75,95	69,11
3	2017	69,45	76,18	75,83	68,13
4	2018	71,12	74,62	76,50	69,67
5	2019	72,57	76,97	73,43	68,15

Sumber : *Bimas Buddha Tahun 2015-2019*

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat kecenderungan penurunan nilai rata-rata nilai USBN Agama hampir dalam semua agama. Salah satu penyebab dari penurunan rerata nilai USBN Agama adalah bobot kesulitan soal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Disamping data terkait rata-rata hasil UN dan USBN Agama, salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dapat dilihat dari kualitas lulusan yang dihasilkan. Berikut data terkait jumlah lulusan madrasah yang diterima di perguruan tinggi dalam tiga tahun terakhir :

Tabel 22**Data Jumlah Lulusan Madrasah Aliyah Sulawesi Barat yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi**

Perguruan Tinggi	2017	2018	2019
PTN	211	340	441
PTS	280	270	289

Sumber : *Bidang Pendidikan Madrasah Th. 2017-2019*

Data tabel tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir jumlah lulusan Madrasah Aliyah yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Aspek lain yang menjadi indikator peningkatan mutu agama dan keagamaan adalah indeks integritas siswa. Ada beberapa aspek yang diteliti dan diukur untuk

menghasilkan indeks integritas siswa, yaitu kejujuran, dapat dipercaya, tanggung jawab, adil dan menjaga kehormatan. Dari ke lima aspek tersebut, kondisi yang ada pada siswa madrasah di wilayah Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 23
Indeks Integritas Siswa Madrasah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Target	Capaian
2016	NA	NA
2017	70	64,3
2018	78	69,2
2019	88	100

Sumber : Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Th 2016 – 2019

Pada awalnya, tahun 2017 integritas siswa masih diasumsikan hanya sebatas penilaian tentang kejujuran siswa dalam pelaksanaan Ujian Nasional. Pada tahun 2018, aspek-aspek lain diukur dalam penilaian indeks integritas siswa. Dari target 70, capaian siswa madrasah di Sulawesi Barat baru sebesar 64,3. Namun, belum dapat diungkap, pada aspek mana nilai capaian kurang dan di aspek mana nilai yang dihasilkan cukup tinggi. Pada tahun 2019, capaian siswa madrasah Sulawesi Barat dalam pengukuran indeks integritas mencapai 100 dari angka target yang ditetapkan sebesar 88. Hal ini tentu menjadi sebuah capaian yang harus dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil evaluasi capaian-capaian di atas dan menelaah kondisi strategis saat ini, telah diidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan yang bisa memengaruhi hasil capaian yang lebih baik. Potensi yang diidentifikasi dapat dijadikan modal dasar untuk mendukung capaian Renstra yang akan datang, dan permasalahan untuk diatasi. Berikut merupakan sejumlah potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat pada masa-masa mendatang.

1.2.1 Peningkatan Kualitas Kehidupan Umat Beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam peningkatan kualitas kehidupan umat beragama :

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat di Sulawesi Barat dalam upaya peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan. Partisipasi itu terwujud dalam bentuk berbagai kegiatan bimbingan, pengajaran, dan penyuluhan keagamaan yang selama ini dilakukan secara mandiri, swadaya dan swadana oleh masyarakat. Tingginya tingkat partisipasi ini dipandang sebagai potensi yang dapat memberi kontribusi penting bagi keberhasilan upaya peningkatan kualitas kehidupan umat beragama.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut:

Terlihat adanya kesenjangan yang masih cukup lebar antara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran agama dengan perilaku umat beragama. Di satu sisi, berbagai kegiatan keagamaan tampak begitu semarak dan dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kegairahan keagamaan masyarakat, namun di sisi lain tingkat perilaku sosial yang menyimpang masih tetap cenderung tinggi, antara lain ditandai dengan masih tetap tingginya angka kriminalitas, maraknya kasus-kasus perbuatan asusila serta jumlah kasus korupsi yang juga tidak berkurang intensitasnya.

1.2.2 Peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

Potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam peningkatan harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama :

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah;
- b. Telah terbentuk FKUB Sulawesi Barat dan 6 FKUB Kabupaten / Kota;

- c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal bagi pengelolaan perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, dalam arti baru menyentuh lapisan elite agama, baik tokoh agama maupun majelis agama, tetapi belum menjangkau masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan dengan target dan sasaran yang lebih berorientasi pada masyarakat akar rumput;
- b. Masih terdapat juru penerang/dakwah yang menyampaikan materi penyiaran agama dengan mengabaikan realitas sosial yang plural (majemuk);
- c. Penyalahgunaan agama dan simbol-simbol keagamaan untuk kepentingan politik dan ekonomi tertentu;
- d. Masih berkembangnya kelompok-kelompok yang cenderung melakukan tindakan intoleran sehingga mengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragama.

1.2.3 Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan

Potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama :

- a. Tersedianya struktur organisasi Kementerian Agama yang memungkinkan penyediaan pelayanan sampai tingkat kecamatan, seperti pelayanan administrasi keagamaan bagi umat Islam pada Kantor Urusan Agama (KUA), meliputi pelayanan pernikahan, nasihat perkawinan, bimbingan haji, administrasi perwakafan, pembinaan keluarga sakinah serta pelayanan pembinaan umat secara umum;
- b. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat, terutama tokoh agama, juru penerang/dakwah, dan lembaga keagamaan dalam penyediaan pelayanan bagi

umatnya masing-masing. Hal ini tentu menjadi potensi penting bagi keberhasilan pelayanan keagamaan mengingat terbatasnya kemampuan dan kapasitas di bidang penyediaan pelayanan keagamaan, terutama menyangkut urusan pernikahan, penyediaan kitab suci, serta bimbingan dan penyuluhan agama;

- c. Peningkatan jumlah pendaftar haji merupakan potensi yang perlu dikelola dengan baik serta perencanaan persiapan yang lebih matang. Adanya jemaah haji yang menunggu waktu keberangkatan dalam waktu cukup lama bisa diarahkan dan dibimbing melakukan persiapan. Tahap-tahap persiapan dapat berupa pengadaan dokumen paspor bagi jemaah haji, cek kesehatan, dan bimbingan ibadah bagi calon jemaah haji, adanya persiapan dari masing-masing jemaah haji diharapkan pada saat keberangkatan memiliki kesiapan yang lebih maksimal;
- d. Adanya bandar udara merupakan upaya untuk menciptakan pusat pengembangan wilayah baru, mendorong peningkatan ekonomi, dan pengembangan sektor yang lain. Pada posisi inilah telah dibangun Asrama Haji Transit Sulawesi Barat yang dapat melayani jama'ah haji wilayah Sulawesi Barat, dalam proses menuju Embarkasi Hasanuddin Makassar.

Sementara permasalahan yang muncul dan perlu diatasi adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di beberapa bidang pelayanan;
- b. Jumlah tenaga penyedia pelayanan keagamaan, dilihat dari distribusi dan rasio kecukupan tenaga dibanding yang dibutuhkan, masih jauh dari memadai;
- c. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama ini dekat dengan waktu keberangkatan jemaah haji, hal ini merupakan problem nasional yang setiap tahun terjadi, pelunasan yang mendekati waktu keberangkatan berimplikasi pada pelaksanaan bimbingan ibadah haji yang tidak maksimal, kesempatan untuk

menyelesaian dokumen perjalanan haji sangat singkat, dan persiapan-persiapan lain yang tidak maksimal;

1.2.4 Peningkatan Akses Layanan Pendidikan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan di Sulawesi Barat sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini sebagai dampak dari perkembangan IPTEK;
- b. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi;
- c. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan;
- d. Sesuai buku pedoman penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah, dimungkinkan KBM pendidikan diniyah diselenggarakan di tiap-tiap SD, yang pengaturan waktunya disesuaikan menurut kebijakan sekolah setempat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan akses layanan pendidikan adalah :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan;
- b. Dominasi kegiatan-kegiatan siswa sore hari di sekolah formal, menjadi kendala tersendiri bagi penyelenggaraan KBM di lembaga pendidikan keagamaan;
- c. Belum maksimalnya dukungan pemerintah daerah bagi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah mengenai pendanaan.

1.2.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan

Potensi yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan berciri khas agama dan pendidikan keagamaan di Sulawesi Barat sebagai berikut :

- a. Sulawesi Barat terdapat banyak perguruan tinggi yang dapat dilakukan kerjasama untuk pengembangan madrasah dan lembaga pendidikan umum berciri agama;
- b. Meningkatnya prestasi santri di berbagai event nasional;

- c. Peningkatan Prestasi Siswa pada berbagai perlombaan baik KSM, OSN, MYERS, maupun KTI;
- d. Penerapan *e-learning* sebagai salah satu metode pembelajaran alternatif.
- e. Guru dan pengawas PAI di Sulawesi Barat ada yang sudah ditetapkan menjadi instruktur pengembangan kurikulum 13 tingkat nasional;
- f. Literasi teknologi informasi guru agama yang sudah mulai meningkat;

Permasalahan yang ada pada sasaran peningkatan mutu pendidikan umum berciri khas agama dan lembaga pendidikan keagamaan :

- a. Belum semua lembaga pendidikan keagamaan distandarisasi, baik dalam aspek kurikulum maupun sarana prasarana penunjangnya;
- b. Ketersediaan tenaga guru kurang memadai dibanding jumlah mata pelajaran yang ada, masih banyak dilakukan tugas rangkap;
- c. Kurikulum PAI TK belum ada sehingga penghitungan jam pelajaran guru PAI TK mengalami kesulitan;
- d. Rasio jumlah Siswa-Pendidik yang masih terlalu rendah menimbulkan persoalan dalam hal efisiensi pembiayaan pendidikan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat merujuk pada Visi dan Misi Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2020 – 2024 adalah **“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”**. Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu :

1. Meningkatkan kesalehan umat beragama;
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;
5. Meningkatkan produktivitas, dan daya saing pendidikan; dan
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

2.1 Tujuan

Kementerian Agama pada Renstra tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) tujuan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
6. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat mendukung pelaksanaan lima dari enam tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu :

1. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial;
2. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas;
5. Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

2.2 Sasaran Kegiatan

Untuk mencapai tujuan Kementerian Agama ditetapkan sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kementerian Agama menetapkan 13 sasaran strategis dalam rangka mencapai 6 (enam) tujuan. Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat mendukung 11 Sasaran Strategis dan 16 Sasaran Program dari 5 (lima) tujuan yang dijalankan sesuai tugas dan fungsinya. Dalam rangka mencapai 5 (lima) tujuan sebagaimana disebutkan diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 54 sasaran kegiatan yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024. Adapun Sasaran Kegiatan yang mendukung dan bersesuaian dengan tujuan, sasaran strategis dan sasaran program sebagaimana tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

- 2.2.1 Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS1	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Sasaran Kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyuluhan agama dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 - a. Nilai kinerja penyuluh agama;
 - b. Persentase penyuluh agama yang dibina;
 - c. Jumlah penyiara agama yang dibina kompetensi;
 - d. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan;

2.2.2 Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS2	Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama 2. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama 3. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama 4. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti;
 - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina;

- c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina.
2. Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi;
 - b. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan.
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama;
 - b. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan.
5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat.
6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase rumah ibadah yang ramah;
 - b. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina;
 - c. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya;
 - d. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan.
7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik.

8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;
 - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;
 - h. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;
 - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;
 - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;
 - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama.
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat;

- b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al-Qur'an.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS3	Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya	Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :

1. Menguatnya dialog lintas agama dan budaya dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan;
2. Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak, dan sebagainya);
3. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya);
4. Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina;
 - b. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina.

2.2.3 Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Meningkatkan kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan 2. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;
 - b. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;
 - c. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;
 - d. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;
 - e. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;
 - f. Jumlah SDM Ahli Falakiah yang dibina;
 - g. Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah/rujuk dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Jumlah KUA yang direvitalisasi;
 - b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana;
 - c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah;
 - d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah;
 - e. Jumlah penghulu yang dibina.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga dengan indikator

kinerja kegiatan, yaitu jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya.

4. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.
5. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan.
6. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan;
 - b. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu.
7. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji.
8. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu dengan indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase keberlanjutan layanan (*Continuity Service*).

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS5	Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat	Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :

- a. Persentase amil yang dibina ;
 - b. Persentase lembaga zakat yang dibina.
2. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase lembaga wakaf yang dibina;
 - b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan;
 - c. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat.

2.2.4 Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut :

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS6	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran	Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;
 - c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan;
 - d. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan.
2. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;
 - d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan;
 - e. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan;
 - f. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi
 - g. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi.
3. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
- a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran;
 - c. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran;
 - d. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS7	Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan	Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - b. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - c. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - d. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana;
 - e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;
 - f. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya;
 - g. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana.
2. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah siswa madrasah penerima BOS;
 - b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS
 - c. Persentase siswa madrasah penerima PIP
 - d. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP

- e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.
3. Meningkatnya kualitas penanganan ATS dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi;
 - b. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren.
 4. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu : jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP.

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS8	Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik	1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 2. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi;
 2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi;
 3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi ;
 4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;

2. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - b. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - c. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
 - d. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal;
3. Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;
 2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;
 3. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1;
 4. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2.
4. Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan
 - a. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus
 - b. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS9	Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:

1. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu:
 - a. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
 - b. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.

2. Meningkatnya budaya mutu pendidikan dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu
 - b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
 - c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
 - d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS10	Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa	Menguatnya pendidikan karakter siswa

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yaitu :

1. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan dengan indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam

- pembelajaran;
- b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;
 - d. Persentase madrasah yang ramah anak.
 - e. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.
2. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 - b. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
 - c. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
 - d. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina

2.2.5 Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif

dicapai dengan menetapkan sasaran strategis dan sasaran program sebagai berikut:

Kode	Sasaran Strategis	Sasaran Program
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel

Sasaran strategis dan sasaran program pada tabel di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :
 - a. Persentase produk hukum yang diterbitkan;
 - b. Persentase kasus hukum yang terselesaikan;
 - c. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri dengan indikator kinerja kegiatan yaitu :Persentase rekomendasi izin orang asing
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) :
 - a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;
 - b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti;
 - c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;
 - d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);
 - e. Persentase ASN yang memenuhi syarat *leveling* kompetensi jabatannya;
 - f. Persentase data ASN yang diupdate.
4. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
 - b. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - c. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;
 - d. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.
5. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel dengan indikator kinerja

kegiatan sebagai berikut :

- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;
 - b. Persentase tanah yang bersertifikat;
 - c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.
6. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;
 - b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;
 - c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.
7. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;
 - c. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.
8. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data;
 - b. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;
 - c. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti.
9. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;

- b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.
10. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor dengan indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar;
 11. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu;
 - b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik;
 - c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen;
 - d. Persentase menurunnya lelang gagal;
 - e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding.
 12. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tanggadengan indikator kinerja kegiatan, yakni persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan;
 13. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;
 - b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter.
 14. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar;
 - b. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable.
 15. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan dengan indikator kinerja kegiatan, yaitu jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

2.3 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan Kementerian Agama dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai Sasaran Kegiatan, indikator kinerja sasaran kegiatan, cara pengukuran, penanggung jawab, sumber data, dan periode pelaporan. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 35

Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai kinerja penyuluh agama 2. Persentase penyuluh agama yang dibina 3. Jumlah penyiara agama yang dibina kompetensi 4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan 	<p>Menggunakan Instrumen/Aplikasi Penyuluh Agama</p> <p>Jumlah penyuluh agama yang dibina dibagi jumlah penyuluh agama dikali 100%</p> <p>Jumlah penyiara agama yang mendapatkan pembinaan kompetensi</p> <p>Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan dalam penyuluhan agama</p>	Bidang Bimais, Semua Bimas	Bidang Bimais, Semua Bimas	<p>Tahunan</p> <p>Triwulanan</p> <p>Triwulanan</p> <p>Triwulanan</p>
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 	<p>Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100%</p> <p>Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan</p>	Ortala dan KUB	Ortala dan KUB	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p>

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan			Tahunan
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi 2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mendapatkan fasilitas Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Oratala dan KUB	Oratala dan KUB	Tahunan Tahunan
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Sekber FKUB dikali 100%	Oratala dan KUB	Oratala dan KUB	Tahunan
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama 2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat dikali 100% Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Oratala dan KUB, Bidang Bimais	Oratala dan KUB, Bidang Bimais	Tahunan Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluh agama yang dibina moderasi beragama dibagi jumlah penyuluh agama dikali 100%	Bidang Bimais, Semua Bimas	Bidang Bimais, Semua Bimas	Tahunan
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	<ol style="list-style-type: none"> Persentase rumah ibadah yang ramah Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan 	<p>Jumlah rumah ibadah yang ramah dibagi Jumlah rumah ibadah dikali 100%</p> <p>Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi jumlah pengelola rumah ibadah dikali 100%</p> <p>Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya</p> <p>Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan</p>	Bidang Bimais, Semua Bimas	Bidang Bimais, Semua Bimas	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p>
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Bidang Bimais, Semua Bimas	Bidang Bimais, Semua Bimas	Tahunan
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	<ol style="list-style-type: none"> Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh 	<p>Jumlah siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama</p>	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama</p>	<p>yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100%</p> <p>Jumlah guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru di sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah dikali 100%</p>			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama</p> <p>10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama</p>	<p>Jumlah pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas di sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama jumlah pengawas pendidikan agama di sekolah umum dikali 100%</p> <p>Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama</p> <p>Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama</p>			
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	<p>1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat</p> <p>2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah</p>	<p>Jumlah pesantren yang mendapatkan pembinaan moderasi beragama dibagi jumlah pesantren</p> <p>Jumlah kenaikan peserta Pendidikan Diniyah Takmiliah dan Pendidikan Al-</p>	Bidang Pakis	Bidang Pakis	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		takmilyah dan pendidikan AlQur'an	Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmilyah dan pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali 100%			
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Ortala dan KUB	Ortala dan KUB	Semesteran
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasisagama yang memberikan manfaat terhadapkesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Jumlah produk budaya berbasisagama yang memberikan manfaat terhadapkesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Bidang Bimais, semua Bimas	Bidang Bimais, semua Bimas	Tahunan
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, STQ, Pesparawi, Ustawa, dan sebagainya)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, STQ, Pesparawi, Ustawa, dan sebagainya)	Bidang Bimais, semua Bimas	Bidang Bimais, semua Bimas	Tahunan
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi 2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang mendapatkan	Bidang Bimais, semua Bimas	Bidang Bimais, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		yang dibina	pembinaan			
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar 	<p>Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan</p> <p>Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan</p> <p>Jumlah lembaga keagamaan yang difasilitasi dibagi Jumlah lembaga keagamaan</p> <p>Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan</p> <p>Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat</p> <p>Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina</p> <p>Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar</p>	Bidang Bimais, semua Bimas	Bidang Bimais, semua Bimas	Tahunan
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah KUA yang direvitalisasi Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra 	<p>Jumlah KUA yang direvitalisasi</p> <p>Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana</p> <p>Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah</p>	Bidang Bimais	Bidang Bimais	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p> <p>Bulanan</p>

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>nikah</p> <p>4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</p> <p>5. Jumlah penghulu yang dibina</p>	<p>Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah</p> <p>Jumlah penghulu yang mendapatkan pembinaan</p>			<p>Bulanan</p> <p>Semesteran</p>
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Bidang Bimais, semua Bimas	Bidang Bimais, semua Bimas	Tahunan
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah KBIHU/PPIU/PIHK yang terbina dan terawasi dibagi jumlah keseluruhan KBIHU/PPIU/PIHK dikalikan 100%	Bidang PHU	Bidang PHU	Tahunan
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	<p>1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan</p> <p>2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan</p>	<p>Jumlah Bangunan gedung PLHUT yang diusulkandan dilaksanakan</p> <p>Jumlah Seksi PHU Kab. Kota yang dibangun PLHUT dan menerapkan</p>	Bidang PHU	Bidang PHU	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p>

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		pada tahun bersangkutan	<p>elayanan haji sesuai dengan standar SOP, SPM dan kode etik ASN</p> <p>Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan dibandingkan dengan jumlah kouta berangkat haji Prov. Sulawesi Barat</p>			
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	<p>1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan</p> <p>2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu</p>	<p>Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan</p> <p>Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu</p>	Bidang PHU	Bidang PHU	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p>
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Bidang PHU	Bidang PHU	Tahunan
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat	Bidang PHU	Bidang PHU	Tahunan
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	<p>1. Persentase amil yang dibina</p> <p>2. Persentase lembaga zakat yang dibina</p>	<p>Jumlah amil yang dibina dibagi Jumlah amildikali 100%</p> <p>Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi Jumlah lembaga zakatdikali 100%</p>	Bidang Bimais	Bidang Bimais	Tahunan
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi Jumlah lembaga wakafdikali 100%	Bidang Bimais	Bidang Bimais	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi Jumlah akta ikrar wakaf dikali 100% Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi Jumlah tanah wakaf dikali 100%			
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum 2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum 3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan 4. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Jumlah madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah madrasah dikali 100% Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi Jumlah sekolah keagamaan dikali 100% Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Jumlah guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru di	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan</p> <p>3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan</p> <p>4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi</p> <p>7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti</p>	<p>madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi</p> <p>Jumlah guru di sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru pendidikan agama dikali 100%</p> <p>Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan</p> <p>Jumlah siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah siswa sekolah keagamaan</p>			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		asesmen kompetensi	yang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa sekolah keagamaan dikali 100%			
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran 4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran 	<p>Jumlah madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah sekolah keagamaan dikali 100%</p> <p>Jumlah mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan dikali 100%</p>	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha	Jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		yang memenuhi SPM sarana prasarana	sarana prasarana dibagi jumlah RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha dikali 100%			
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman dikali 100%			
		3. Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman dikali 100%			
		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah MA/Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman dikali 100%			
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi	Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana			

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		SPM sarana dan prasarana	dibagi Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren dikali 100%			
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya 7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah madrasah/sekolah keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya dikali 100% Jumlah Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi Jumlah Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal dikali 100%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah 2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS 3. Persentase siswa madrasah penerima PIP 4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP 5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan	Jumlah siswa madrasah yang menerima BOS Jumlah siswa sekolah keagamaan yang menerima BOS Jumlah siswa madrasah yang menerima PIP dibagi jumlah siswa madrasah dikali 100% Jumlah siswa sekolah keagamaan yang menerima PIP dibagi jumlah siswa sekolah keagamaan dikali 100% Jumlah pondok pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		Operasional.	dibagi jumlah pondok pesantren dikali 100%			
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	<p>1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi</p> <p>2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren</p>	<p>Jumlah madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dibagi jumlah madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren dibagi jumlah pesantren dikali 100%</p>	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis	Tahunan
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	<p>1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi</p> <p>2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan</p>	<p>Jumlah guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi dibagi jumlah guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p> <p>Jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan</p>	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</p> <p>3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi</p> <p>4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG</p>	<p>diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi Jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p> <p>Jumlah kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi jumlah kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p> <p>Jumlah ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG dibagi Jumlah ustad pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%</p>			
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal dibagi seluruh jumlah guru dikali 100%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</p> <p>3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</p> <p>4. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal</p>	<p>Jumlah guru yang mengikuti PPG dibagi seluruh jumlah guru PAI dikali 100%</p> <p>Jumlah guru agama yang berkualifikasi minimal S1 dibagi seluruh jumlah guru agama dikali 100%</p> <p>Jumlah calon pengawas madrasah/sekolah keagamaan yang menerima beasiswa S2 dikali seluruh jumlah guru madrasah/sekolah agama dikali 100%</p>			
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	<p>1. Persentase guru madrasah yang mengikuti PPG;</p> <p>2. Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG;</p> <p>3. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1</p>	<p>Jumlah guru yang mengikuti PPG dibagi seluruh jumlah guru madrasah dikali 100%</p> <p>Jumlah guru yang mengikuti PPG dibagi seluruh jumlah guru PAI dikali 100%</p> <p>Jumlah guru agama yang berkualifikasi minimal s1 dibagi seluruh jumlah guru agama dikali 100%</p>	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		4. Persentase Calon Pengawas madrasah yang menerima beasiswa S2	Jumlah calon pengawas madrasah /sekolah keagamaan yang menerima beasiswa S2 dikali seluruh jumlah guru madrasah/sekolah agama dikali 100%			
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus 2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	Jumlah guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus dibagi seluruh jumlah guru/tenaga kependidikan di daerah 3T dikali 100%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis	Tahunan
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi. 2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/madrasah /sekolah keagamaan yang mendapat fasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi dibagi seluruh jumlah madrasah/pendidikan diniyah/madrasah /sekolah keagamaan dikali 100%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu 2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	Persentase Madrasah /Sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</p> <p>4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</p>	<p>Prosentase siswa yang mengikuti Kompetisi Nasional maupun internasional</p>			
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	<p>1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;</p> <p>2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran</p> <p>3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;</p> <p>4. Persentase madrasah yang</p>	<p>Jumlah MTs/ MA/ SMPTK/ SMTK/ SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dibagi seluruh jumlah MTs/ MA/ SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman dikali 100%</p> <p>Jumlah kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman dibagi seluruh kepala pendidikan diniyah/muadalah kali 100%</p>	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		ramah anak. 5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.	Jumlah Madrasah/ Sekolah keagamaan yang ramah anak dibagi seluruh jumlah madrasah/sekolah keagamaan dikali 100%			
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan 3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina 4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada Madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan Jumlah gugus pramuka pada Madrasah/ Pendidikan keagamaan yang dibina	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	Tahunan
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan 2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan		Kepegawaian dan Hukum	Kepegawaian dan Hukum	Tahunan
41	Meningkatnya kualitas	Persentase rekomendasi izin		Ortala dan KUB	Ortala dan KUB	Semesteran

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	pengelolaan kerjasama luar negeri	orang asing				
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja 2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti 3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan 4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) 5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya 6. Persentase data ASN yang diupdate 	<p>Implementasi anjab dan abk</p> <p>PP 53 tahun 2010/ PP 94 tahun 2021</p> <p>Penempatan pegawai berdasarkan hasil assesment dan kompetensi</p> <p>Penempatan pegawai berdasarkan hasil assesment dan kompetensi</p> <p>Digitalisasi Simpeg</p>	Kepegawaian dan Hukum	Kepegawaian dan Hukum	Semesteran
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II	Laporan keuangan berdasarkan SAPP	Keuangan dan BMN	Keuangan dan BMN	Semesteran

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	tertib sesuai dengan ketentuan	<p>yang sesuai standar dan tepat waktu,</p> <p>2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)</p> <p>3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal</p> <p>4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama</p>	<p>Kecukupan pengungkapan atas pelaksanaan anggaran</p> <p>Optimalisasi serapan anggaran</p> <p>Penyelesaian TLHP</p>			
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	<p>1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya</p> <p>2. Persentase tanah yang bersertifikat</p> <p>3. Persentase nilai <i>Opname Physic</i> (OP)BMN</p>	<p>Dokumen PSP dan SIP</p> <p>Dokumen PSP dan SIP</p> <p>Dokumen PSP dan SIP</p>	Keuangan dan BMN	Keuangan dan BMN	Semesteran
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur	Implementasi SOP dan Layanan PTSP	Ortala dan KUB	Ortala dan KUB	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		<p>berdasarkan peta proses bisnis</p> <p>2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi</p> <p>3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti</p>	<p>Penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Penyelesaian TLHP</p>			
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	<p>1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas</p> <p>3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja</p>	<p>Piloting Satker dalam peningkatan RB</p> <p>Piloting Satker dalam peningkatan ZI</p> <p>Implementasi rencana aksi dan program kerja agen perubahan berdasarkan peta proses bisnis organisasi</p>	Ortala dan KUB	Ortala dan KUB	Tahunan
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<p>1. Persentase output perencanaan yang berbasis data</p> <p>2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra</p> <p>3. Persentase perencanaan</p>	<p>Ketersediaan Alokasi anggaran satuan kerja</p> <p>Implementasi SIPKA</p> <p>Penyesuaian rencana program</p>	Perencanaan, Data dan Informasi	Perencanaan, Data dan Informasi	Tahunan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
		kerjasama yang ditindaklanjuti	dan kegiatan lintas sektoral			
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas 2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	Implementasi SMARTDJA Implementasi e-MONEV	Perencanaan, Data dan Informasi	Perencanaan, Data dan Informasi	Tahunan
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Alokasi Anggaran Sarana dan Prasarana Perkantoran	Umum dan Humas	Umum dan Humas	Tahunan
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen 4. Persentase menurunnya lelang gagal 5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	Penataan arsip dan distribusi surat masuk secara tepat Digitalisasi arsip/dokumen Digitalisasi arsip/dokumen Kesesuaian standar dokumen pengadaan barang dan jasa Kesesuaian standar dokumen pengadaan barang dan jasa	Umum dan Humas	Umum dan Humas	Tahunan
51	Meningkatnya kualitas	Persentase kepuasan pelayanan	Pengadaan buku tamu terkait kepuasan	Umum dan Humas	Umum dan	Triwulan

No.	Sasaran Kegiatan	IKSK	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKSK	Sumber Data IKSK	Periode Pelaporan IKSK
	pelayanan umum dan rumah tangga	tamu pimpinan	layanan serta saran dan masukan		Humas	
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi 2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter	Optimalisasi website dan amedia sosial serta layanan ruang publik Optimalisasi website dan amedia sosial serta layanan ruang publik	Umum dan Humas	Umum dan Humas	Semesteran
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1. Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar 2. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	Optimalisasi website dan amedia sosial serta layanan ruang publik Optimalisasi website dan amedia sosial serta layanan ruang publik	Perencanaan, Data dan Informasi	Perencanaan, Data dan Informasi	Semesteran
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Optimalisasi data pengawas, guru, pegawai PNS dalam aplikasi	Kepegawaian dan Hukum	Kepegawaian dan Hukum	Triwulan

Sumber :Perdatin, 2020

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1 Target Kinerja

Dalam rangka menjalankan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat memiliki strategi melalui 9 (sembilan) Program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama,
2. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah,
3. Program Pendidikan Islam,
4. Program Bimbingan Masyarakat Islam,
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen,
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik,
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu,
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha,
9. Program Kerukunan Umat Beragama.

Sementara itu, mulai tahun 2021 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menjalankan arah kebijakan tersebut melalui program yang sudah disederhanakan menjadi 4 (empat) program, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
3. Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
4. Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan Program dimaksud, yaitu :

1. Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
2. Pembinaan Administrasi Kepegawaian

3. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
4. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
5. Pembinaan Administrasi Perencanaan
6. Pembinaan Administrasi Umum
7. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
8. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
9. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
10. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
11. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen
12. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen
13. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik
14. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
15. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu
16. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu
17. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha
18. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha
19. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
20. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
21. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
22. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
23. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
24. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen
25. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik
26. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu
27. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha
28. Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu
29. Pembinaan Umrah dan Haji Khusus

30. Pelayanan Haji Dalam Negeri
31. Pembinaan Haji
32. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
33. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
34. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
35. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
36. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
37. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen
38. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik
39. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu
40. Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha
41. Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu
42. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
43. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam
44. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen
45. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik
46. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu
47. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya keberhasilan program-program dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat menetapkan 5 (lima) tujuan dan telah dilengkapi dengan 54 sasaran kegiatan, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dalam 5 (lima) tahun ke depan, seperti yang tertera pada BAB II. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Sasaran Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 36
Target Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Barat
Sampai dengan Tahun 2024

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BASE LINE	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	5	10	4	18
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1 Nilai Kinerja Penyuluh Agama	NA	83	Nilai	Bidang Bimais, Semua Bimas
		2 Persentase penyuluh agama yang dibina	NA	95	%	
		3 Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	100	700	Orang	
		4 Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	300	1,400	Kelompok	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1 Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindak lanjuti	63	100	%	Ortala dan KUB
		2 Jumlah aktor kerukunan yang dibina	373	400	Orang	
		3 Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	2	6	Desa	
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1 Jumlah lembaga agama, organisas sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	0	3	Lembaga	Ortala dan KUB
		2 Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	11	11	Keg	

4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	100	%	Ortala dan KUB
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1 Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	0	35	%	Ortala dan KUB
		2 Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	0	7	Kegiatan	
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	86	99	%	Bidang Bimais, Semua Bimas
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1 Persentase rumah ibadah yang ramah	NA	23	%	Bidang Bimais, Semua Bimas
		2 Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	NA	20	%	
		3 Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	6	56	Orang	
		4 Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	3	6	Lokasi	
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	0	9	Kegiatan/ Konten	Bidang Bimais, Semua Bimas
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang public	1 Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	NA	100	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas
		2 Persentase siswa di sekolah keagamaan	NA	100	%	

		yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;				
	3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	NA	94	%	
	4	Persentase guru dimadrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	20	20	%	
	5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	85	%	
	6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	82	%	
	7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	19.6	%	
	8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	60	%	
	9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	NA	75	%	
	10	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;	NA	75	Kegiatan	

		11	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	NA	1	Kegiatan	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1	Persentase pesantren yang berwawasan moderat	50	0	%	Bidang Pakis
		2	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	1	0	%	
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya		Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	5	7	Lokasi	Ortala dan KUB
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat		Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	3	21	Lokasi	Bidang Bimais, Semua Bimas
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama		Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ, STQ, Ustawa, Pesparawi dll)	8	62	Event	Bidang Bimais, Semua Bimas
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1	Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	1	101	KUA	Bidang Bimais, Semua Bimas
		2	Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	27	301	Pengelola	
15	Meningkatnya kualitas sarana	1	Jumlah sarana dan prasarana layanan	320	1,275	Paket	Bidang Bimais,

	pendukung pelayanan keagamaan	peribadatan yang disediakan;				Semua Bimas
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	1,200	9,230	Buah	
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	21	959	%	
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	3	55	Layanan	
		5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	127	2,137	Lokasi	
		6 Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;	6	81	Orang	
		7 Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	0	1	Lokasi	
16	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama nikah/rujuk (Islam)	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi	0	53	KUA	Bidang Bimais
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	20	53	KUA	
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	2,200	10,582	Orang	
		4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	1,000	8,480	Anak	
		5 Jumlah penghulu yang dibina	9	109	Orang	
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani	505	2,965	Keluarga	Bidang Bimais, Semua Bimas

		/bahagia/sukina h/hitta sukhaya				
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	80	88	%	Bidang PHU
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1 Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	0	100	%	Bidang PHU
		2 Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0.5	1	%	
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	1 Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	0	65	%	Bidang PHU
		2 Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	99	99	%	
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	95	98	%	Bidang PHU
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	90	98	%	Bidang PHU
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1 Persentase amil yang dibina	0	100	%	Bidang Bimais
		2 Persentase lembaga zakat yang dibina	40	100	%	
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1 Persentase lembaga wakaf yang dibina	18	100	%	Bidang Bimais
		2 Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	63	93	%	

		3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	38	53	%	
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	20	100	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2	Persentase pendidikan diniyah/muadala h yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;	5	30	%	
		3	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	75	97	%	
		4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan:	17	27	Madrasah	
		5	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kej uruan	2	11	Madrasah	
26	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan	1	Persentase guru di madrasah/sekol ah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	NA	100	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2	Persentase ustadz di pendidikan diniyah/muadala h yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	10	50	%	
		3	Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	11	50	%	

		4	Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan	NA	731	Penghargaan	
		5	Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	NA	0	Kegiatan	
		6	Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	NA	100	%	
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah / muadala hyang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	NA	50	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2	Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	NA	21	%	
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	NA	96	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2	Persentase MI/Ula/SDTK/A dhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	NA	65	%	
		3	Persentase MTs/Wustha/S MPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	30	68	%	

		4	Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	NA	0	%	
		5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	NA	40	%	
		6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	0	0	%	
		7	Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhamm aseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	43	76	%	
29	Meningkatnya anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1	Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	36,915	242,360		Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2	Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/P DF Muadalah;	2,500	16,868	Siswa	
		3	Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekol ah keagamaan	25	0	%	
		4	Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/P DF Muadalah;	10	15	%	
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1	Persentase madrasah yang menyelenggara kan pendidikan inklusi	0	1	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis
		2	Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	10	40	%	
31	Menguatnya pelayanan 1		jumlah siswa RA/Pratama Widya	6,330	42,814	Siswa	Bidang Pendidikan

	Tahun Prasekolah	Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP				Madrasah, Pakis, semua Bimas	
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadala h yang lulus sertifikasi;	47	90	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadala h yang memperoleh peningkatan kompetensi;	1	16	%	
		3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadala h yang memperoleh peningkatan kompetensi ;	NA	18	%	
		4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadala h yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	NA	15	%	
		5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	NA	94	%	
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	NA	44	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas	
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	NA	0	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	20	0	%	

		3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	30	91	%	
		4	Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	NA	2	%	
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1	Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan Khusus	0	0	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis
		2	Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	0	0	%	
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi		Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/madrasah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	31	142	Madrasah	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	NA	0	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	NA	1	%	
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari	1	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam	NA	100	%	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas

	kekerasan	pembelajaran				
		2 Persentase kepala pendidikan diniyah/muadala h yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	NA	100	%	
		3 Persentase madrasah/sekol ah keagamaan yang ramah anak	NA	100	%	
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan an pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1 Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidi kan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	NA	425	Organisasi Ekstrakulikuler	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, semua Bimas
		2 Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendi kan keagamaan yang dibina	183	458	Gugus	
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1 Persentase produk hukum yang diterbitkan	0	0	%	Kepegawaian dan Hukum
		2 Persentase kasus hukum yang terselesaikan	0	0	%	
		3 Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	0	0	Kegiatan	
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	0	0	%	Ortala dan KUB
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan	1 Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	80	98	%	Kepegawaian dan Hukum
		2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin,	75	100	%	

	pengembangan pegawai)		pemberhentian dan pensiun yang ditandak lanjut				
		3	Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	80	100	%	
		4	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	0	0	%	
		5	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	0	95	%	
		6	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	90	90	%	
		7	Persentase data ASN yang diupdate	80	100	%	
		8	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	80	100	%	
43		Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	118	708	Dokumen
	2		Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	100	100	%	
	3		Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	80	90	%	
	4		Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	80	100	%	

44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	30	95	%	Keuangan dan BMN
		2	Persentase tanah yang bersertifikat	75	95	%	
		3	Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN	35	85	%	
45	Meningkatnya kualitas Penataan dan penguatan manajemen organisasi	1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	50	85	%	Ortala dan KUB
		2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	75	85	%	
		3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	75	95	%	
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	65	80	%	Ortala dan KUB
		2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	23	46	Satker	
		3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	5	26	Orang	
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	80	99	%	Perencanaan, Data dan Informasi
		2	Persentase keselarasan muatan Renja	60	88	%	

		dengan Renstra				
		3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	65	100	%	
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	80	90	%	Perencanaan, Data dan Informasi
		2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	70	90	%	
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80	85	%	Umum dan Humas
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	85	90	%	Umum dan Humas
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	85	95	%	
		3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	90	95	%	
		4 Persentase menurunnya lelang gagal	0	0	%	
		5 Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	0	0	%	
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	80	85	%	Umum dan Humas
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	85	90	%	Umum dan Humas
		2 Persentase pemberitaan negatif tentang	90	95	%	

		Kementerian Agama yang discounter					
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1	Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	70	85	%	Perencanaan, Data dan Informasi
		2	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	75	90	%	
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan		Persentase Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	0	0	%	Kepegawaian dan Hukum

Sumber : Subbag Perencanaan Data dan Informasi 2020

3.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan, sasaran dan program beserta kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama yang telah ditetapkan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan berasal dari Pemerintah baik dari pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber pendanaan yang sekarang ini sudah berjalan adalah dari Rupiah Murni, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak mengikat. Kerangka pendanaan dalam Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama 2020-2024 menjadi acuan dalam perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan untuk menunjang implementasi program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama berbasis Renstra, serta berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan pendanaan nasional.

Adapun Rencana pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama sampai dengan tahun 2024 pada tabel berikut :

Tabel 37

Rencana Pendanaan 9 (Sembilan) Program

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	
KANWIL KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI SULAWESI BARAT	879.109.838					
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	33,663,859					
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	0					
Pembinaan Administrasi Kepegawaian	0					
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	23,255,328					
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	0					
Pembinaan Administrasi Perencanaan	0					
Pembinaan Administrasi Umum	10,408,531					

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	0					
Program Kerukunan Umat Beragama	555,369					
Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	0					
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	555,369					
Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	0					
Program Bimbingan Masyarakat Islam	135. 275. 268					
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	17. 720. 100					
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	1. 590. 000					
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	9. 023. 910					
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	3. 435. 250					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	103. 506. 008					
Program Pendidikan Islam	645. 208. 631					
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	78. 224. 593					
Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	9. 617. 690					
Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	106. 560. 822					
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	135. 184. 550					
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	315. 620. 976					
Program Bimbingan Masyarakat Kristen	13. 606. 415					
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	1. 199. 753					
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1. 124. 519					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	1. 312. 569					
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	9. 969. 574					
Program Bimbingan Masyarakat Katolik	21. 611. 472					
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	1. 946. 190					

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	1.517.348					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	3.127.444					
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	15.020.490					
Program Bimbingan Masyarakat Hindu	6.447.239					
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	1.250.175					
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.533.500					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	790.449					
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	2.873.115					
Program Bimbingan Masyarakat Buddha	1.216.000					
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha	231					
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha	430					
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	555					
Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	21.525.585					
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	-					
Pelayanan Haji Dalam Negeri	11.827.421					
Pembinaan Haji	1.136.520					
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji	-					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	8.561.644					

Sumber : Subbag Perencanaan Data dan Informasi 2020

Tabel 38

Rencana Pendanaan 4 (Empat) Program

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
KANWIL KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI SULAWESI BARAT		528,579,622	546,147,783	569,535,283	590,760,455	2,235,023,143
Program Dukungan Manajemen		302,799,292	308,950,323	318,491,921	328,077,067	1,258,318,603
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		312,980	443,280	467,840	491,098	1,715,198
Pembinaan Administrasi Kepegawaian		494,817	654,908	674,879	691,097	2,515,701
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		23,629,194	24,002,257	24,134,321	24,221,678	95,987,450
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		175,000	195,000	205,000	215,000	790,000
Pembinaan Administrasi Perencanaan		1,055,000	1,073,111	1,378,087	1,121,315	4,627,513
Pembinaan Administrasi Umum		10,616,007	11,000,000	11,013,210	11,135,217	43,764,434
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		80,000	115,321	167,581	192,473	555,375
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		9,236,202	9,340,625	9,423,520	9,577,959	37,578,306
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		162,140,216	165,226,275	172,364,560	179,750,386	679,481,437
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		78,500,000	79,677,500	80,872,600	82,085,700	321,135,800
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen		1,338,820	1,365,597	1,392,909	1,420,767	5,518,093
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen		10,218,813	10,474,284	10,736,141	11,004,544	42,433,782
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik		1,943,560	2,040,738	2,142,774	2,249,913	8,376,985
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik		1,450,300	1,525,000	1,585,300	1,645,500	6,206,100
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu		116,360	126,748	132,787	158,755	534,650
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu		1,180,423	1,346,949	1,450,545	1,701,655	5,679,572

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha		309,000	340,000	347,000	411,000	1,407,000
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha		2,600	2,730	2,867	3,010	11,207
Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama		26,204,851	28,404,108	29,550,690	30,531,299	114,690,948
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		1,274,466	1,357,611	1,481,243	1,511,247	5,624,567
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		9,533,758	9,724,500	9,918,500	10,117,300	39,294,058
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		596,700	608,600	620,800	633,200	2,459,300
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		6,777,500	6,913,050	7,051,300	7,192,300	27,934,150
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		533,500	560,200	589,200	618,500	2,301,400
Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu		-	-	-	-	-
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus		75,000	77,000	79,000	81,000	312,000
Pelayanan Haji Dalam Negeri		3,050,580	3,150,310	3,243,754	3,335,543	12,780,187
Pembinaan Haji		642,370	734,255	875,230	978,160	3,230,015
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji		325,740	354,230	415,523	453,490	1,548,983
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen		152,632	1,181,448	1,210,984	1,241,259	3,786,323
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik		1,859,950	2,217,450	2,328,500	2,444,700	8,850,600
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu		650,655	720,454	850,656	950,600	3,172,365
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha		732,000	805,000	886,000	974,000	3,397,000
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran		165,321,455	170,728,840	178,540,947	185,600,496	700,191,738
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		40,120,300	41,356,422	43,440,230	45,780,443	170,697,395
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam		3,620,866	5,400,000	5,600,000	5,800,000	20,420,866
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen		1,104,369	1,131,978	1,160,277	1,189,284	4,585,908
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		52,112,620	53,225,340	56,445,370	58,760,221	220,543,551
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah		66,110,300	67,120,100	69,220,398	71,320,448	273,771,246
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik		1,600,000	1,750,000	1,837,000	1,909,500	7,096,500

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp. 000,00)					
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu		250,000	302,000	350,672	410,600	1,313,272
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha		403,000	443,000	487,000	430,000	1,763,000
Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu		-	-	-	-	-
Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun		34,254,024	38,064,512	42,951,725	46,551,593	161,821,854
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen		125,378	128,512	131,725	135,018	520,633
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Keagamaan Islam		20,713,446	24,009,800	27,000,000	29,100,000	100,823,246
Peningkatan Akses dan Kualitas Madrasah		10,151,200	10,450,300	12,124,220	13,340,470	46,066,190
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik		2,520,000	2,646,000	2,778,000	2,917,215	10,861,215
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu		400,000	450,900	500,780	600,890	1,952,570
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha		344,000	379,000	417,000	458,000	1,598,000

Sumber : Subbag Perencanaan Data dan Informasi 2020

BAB IV

PENUTUP

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Agama dan Renstra Unit Eselon I tahun 2020-2024. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ini memuat hasil evaluasi Renstra tahun 2015-2019, tujuan, sasaran kegiatan dan kerangka pendanaan yang direncanakan untuk lima tahun yang akan datang.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat ini hendaknya dapat dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), RKA K/L hingga penetapan Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja Pegawai.

Dalam implementasinya, setiap upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dengan seluruh unit kerjanya selama lima tahun yang akan datang harus mengarah pada terpenuhinya target capaian yang tertuang dalam Renstra ini. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat diharapkan lebih terukur dan terevaluasi. Disamping itu, dengan tetap mengacu pada Renstra ini, maka kontribusi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dalam mewujudkan pembangunan bidang agama maupun bidang pendidikan akan sejalan dengan target dari Kementerian Agama. Komitmen dari semua pihak menjadi salah satu faktor tercapainya target dalam Renstra ini serta peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat.



Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Sulawesi Barat,

M. Muflih B. Fattah
M. MUFLIH B. FATTAH

Lampiran I :

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 219 Tahun 2020

Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020-2024

Matrisk Kinerja dan Pendanaan 5 Program

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB				
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT											877,895,054	528,579,622	546,147,783	569,535,283	590,760,455	3,112,918,197					
1	Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama	1	Nilai Kinerja Penyuluh Agama	Nilai	NA	68	73	75	80	83	83							Bidang Bimais, Semua Bimas			
		2	Persentase penyuluh agama yang dibina	%	NA	75	84	88	91	95	95										
		3	Jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi	Orang	100	200	100	100	100	100	700										
		4	Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	300	210	160	342	343	345	1.400										
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindak lanjuti	%	63	75	80	85	90	100	100							Ortala dan KUB			
		2	Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	373	0	40	120	120	120	400										
		3	Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Desa	2	1	1	2	1	1	6										

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Lembaga	0	0	0	1	1	1	3						Ortala dan KUB
		2	Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Keg	11	0	2	3	3	3	11						
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)		Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%	100	100	100	100	100	100							Ortala dan KUB
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	0	0	5	10	10	10	35						Ortala dan KUB
		2	Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan	0	0	1	2	2	2	7						
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama		Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	86	89	91	95	97	99							Bidang Bimais, Semua Bimas

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB		
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOT AL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1	Persentase rumah ibadah yang ramah	%	NA	17	17	22	22	23	23							Bidang Bimais, Semua Bimas	
		2	Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	NA	20	20	20	20	20	20								
		3	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Orang	6	6	8	12	12	12	56								
		4	Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Lokasi	3	1	1	0	1	0	6								
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang public	Kegiatan / Konten	0	1	2	2	2	2	9								Bidang Bimais, Semua Bimas	
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	1	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	%	NA	20	40	60	80	100	100							Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas	
		2	Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	%	NA	80	84	88	94	100	100								

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOT AL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama;	%	NA	80	83	86	88	94	94						
		4	Persentase guru dimadrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	%	20	20	20	20	20	20	20						
		5	Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	%	NA	78	79	80	83	85	85						
		6	Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	%	NA	78	81	81	82	82	82						
		7	Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama;	%	NA	1.9	1.9	9.8	9.8	19.6	19.6						
		8	Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama;	%	NA	56	57	57	58	60	60						
		9	Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama;	%	NA	55	58	60	65	75	75						

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		10 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama;	Kegiatan	NA	55	58	60	65	75	75							
		11 Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	NA	0	0	1	0	0	1							
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1 Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	50	60	70	80	90	100	0							Bidang Pakis
		2 Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	%	1	1	1	2	3	5	0							
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Lokasi	5	0	1	2	2	2	7							Ortala dan KUB
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Lokasi	3	5	3	4	3	3	21							Bidang Bimais, Semua Bimas

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOT AL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh MTQ, STQ, Ustawa, Pesparawi dll)	Event	8	11	10	11	12	10	62							Bidang Bimais, Semua Bimas
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bernafas agama	1 Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi rumah ibadah yang dibina	KUA	1	2	3	30	30	35	101							Bidang Bimais, Semua Bimas
		2 Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Pengelola	27	21	20	80	80	73	301							
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1 Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan;	Paket	320	188	189	191	192	195	1.275							Bidang Bimais, Semua Bimas
		2 Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan;	Buah	1.200	1.450	1.190	1.310	1.930	2.150	9.230							
		3 Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi;	%	21	128	153	178	207	272	959							
		4 Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	Layanan	3	4	12	12	12	12	55							
		5 Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	Lokasi	127	250	260	500	500	500	2.137							
		6 Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina;	Orang	6	10	10	16	19	20	81							

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		7 Jumlah Pusat Observasi Bulan yang memenuhi standar	Lokasi	0	0	0	0	1	0	1							
16	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama nikah/rujuk (Islam)	1 Jumlah KUA yang direvitalisasi	KUA	0	0	1	12	20	20	53							
		2 Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	KUA	20	10	4	9	5	5	53							
		3 Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	2.200	1.214	1.168	2.000	2.000	2.000	10.582							
		4 Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Anak	1.000	1.000	1.980	1.500	1.500	1.500	8.480							
		5 Jumlah penghulu yang dibina	Orang	9	10	20	25	25	29	109							
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani /bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Keluarga	505	275	500	505	550	630	2.965							Bidang Bimais, Semua Bimas
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	80	80	90	90	90	90	88							Bidang PHU

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB		
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	0	0	25	25	25	25	100							Bidang PHU	
		2	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	0.5	1	1	1	1	1	1	1							
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	1	Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan	%	0	10	20	35	55	65	65							Bidang PHU	
		2	Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	99	99	99	99	99	99	99	99							
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji		Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	%	95	98	98	98	98	98	98							Bidang PHU	
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu		Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	%	90	98	98	98	98	98	98							Bidang PHU	
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1	Persentase amil yang dibina	%	0	13	24	49	75	100	100							Bidang Bimais	
		2	Persentase lembaga zakat yang dibina	%	40	58	58	83	100	100	100								
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1	Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	18	36	54	71	89	100	100							Bidang Bimais	
		2	Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	63	74	82	86	89	93	93								
		3	Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	38	39	42	45	49	53	53								

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB			
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1	Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	20	25	50	75	90	100	100							Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas		
		2	Persentase pendidikan diniyah/muadala h yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum ;	%	5	5	7	15	20	30	30									
		3	Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	%	75	75	77	95	97	97	97									
		4	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan:	Madrasah	17	2	2	2	2	2	2	27								
		5	Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Madrasah	2	1	2	2	2	2	2	11								
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1	Persentase guru di madrasah/sekol ah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	NA	100	100	100	100	100	100							Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas		

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 Persentase Ustadz di pendidikan diniyah/muadala h yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	10	12	16	24	37	50	50							
		3 Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	11	26	34	40	45	50	50							
		4 Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan	Penghargaan	NA	155	165	144	117	161	731							
		5 Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	Kegiatan	NA	0	0	0	0	0	0							
		6 Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah/sekolah keagamaan	%	NA	25	30	80	93	100	100							
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1 Persentase madrasah/ pendidikan diniyah / muadala h yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	NA	10	15	30	40	50	50							
		2 Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	NA	21	21	21	21	21	21							
																	Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB		
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOT AL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	66	69	71	93	96	96							Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas	
		2	Persentase MI/Ula/SDTK/A dhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	23	31	38	51	65	65								
		3	Persentase MTs/Wustha/S MPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	30	28	37	45	57	68	68								
		4	Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	NA	60	67	68	77	84	0								
		5	Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%	NA	10	10	10	10	40	40								
		6	Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	0	0	0	0	0	0	0	0							

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB		
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		7 Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	43	72	73	74	75	76	76									
29	Meningkatnya anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	1 Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah		36.915	37.020	39.011	41.031	43.010	45.373	242.360								Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas	
		2 Jumlah siswa penerima BOS pada Sekolah Keagamaan/P DF Muadalah;	Siswa	2.500	2.500	2.650	2.678	2.970	3.570	16.868									
		3 Persentase siswa penerima PIP pada Madrasah/sekolah keagamaan	%	25	47	47	47	47	47	47	0								
		4 Persentase siswa penerima PIP pada Pendidikan Keagamaan/P DF Muadalah;	%	10	10	10	10	10	15	15	15								
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1 Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%	0	0	1	1	1	1	1								Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis	
		2 Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	%	10	10	15	25	35	40	40	40								
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Siswa	6.330	6.644	6.921	7.275	7.632	8.012	42.814								Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas	

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB			
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadala h yang lulus sertifikasi;	%	47	50	67	80	80	90	90							Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas		
		2	Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadala h yang memperoleh peningkatan kompetensi;	%	1	0	0	0	15	16	16									
		3	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadala h yang memperoleh peningkatan kompetensi ;	%	NA	0	0	0	0	18	18									
		4	Persentase ustad pendidikan diniyah/muadala h yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG;	%	NA	15	15	15	15	15	15									
		5	Persentase guru pendidikan agama yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	NA	47	80	91	93	94	94									
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	NA	14	18	28	36	44	44								Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas		

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	1	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	%	NA	3	4	5	6	7	0						Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas
		2	Persentase guru pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	%	20	30	40	45	50	80	0						
		3	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi minimal S1	%	30	80	82	84	87	91	91						
		4	Persentase Calon Pengawas Madrasah/Sekolah Keagamaan yang menerima beasiswa S2	%	NA	0	0	1	1	2	2						
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1	Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan Khusus	%	0	0	0	0	0	0						Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis	
		2	Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	%	NA	0	0	0	0	0	0						
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi		Jumlah madrasah/pendidikan diniyah/madrasah/sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Madrasah	31	20	25	28	32	38	142						Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB	
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	NA	55	60	68	75	83	0						Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas	
		2	Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	NA	0.03	0.02	1	1	1	1							
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1	Persentase MTs/MA/SMPTK/ SMTK/SMAK/ Pesantren/ Pasraman yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	NA	68	75	83	90	100	100						Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas	
		2	Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	%	NA	50	60	65	90	100	100							
		3	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang ramah anak	%	NA	100	100	100	100	100	100							

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawan n pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawan	Organisasi Ekstrakurikuler	NA	65	70	80	90	120	425						Bidang Pendidikan Madrasah, Pakis, Semua Bimas
		2	Jumlah gugus pramuka pada madrasah/Pendidikan keagamaan yang dibina	Gugus	183	35	37	40	60	103	458						
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase produk hukum yang diterbitkan	%	0	0	0	0	0	0	0						Kepegawaian dan Hukum
		2	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	0	0	0	0	0	0	0						
		3	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0					
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri		Persentase rekomendasi izin orang asing	%	0	0	0	0	0	0							Ortala dan KUB
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	80	90	92	94	96	98	98						Kepegawaian dan Hukum

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindak lanjut	%	75	100	100	100	100	100	100							
		3 Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	80	100	100	100	100	100	100							
		4 Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	0	0	0	0	0	0	0							
		5 Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	0	90	92	94	95	95	95							
		6 Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	90	90	90	90	90	90	90							
		7 Persentase data ASN yang diupdate	%	80	100	100	100	100	100	100							
		8 Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%	80	100	100	100	100	100	100							

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB			
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	1	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	Dokumen	118	118	118	118	118	118	708							Keuangan dan BMN		
		2	Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	100	100	100	100	100	100	100									
		3	Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	80	90	90	90	90	90	90									
		4	Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	80	100	100	100	100	100	100									
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	30	95	95	95	95	95	95							Keuangan dan BMN		
		2	Persentase tanah yang bersertifikat	%	75	95	95	95	95	95	95									
		3	Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN	%	35	85	85	85	85	85	85									

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB	
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
45	Meningkatnya kualitas Penataan dan penguatan manajemen organisasi	1	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	50	50	60	70	75	85	85						Ortala dan KUB	
		2	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	75	75	77	80	82	85	85							
		3	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	75	95	95	95	95	95	95							
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	65	67	70	73	76	80	80						Ortala dan KUB	
		2	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Satker	23	3	5	5	5	5	46							
		3	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	5	4	4	4	4	5	26							
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	80	95	96	97	98	99	99						Perencanaan, Data dan Informasi	

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2 Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	60	80	82	84	86	88	88							
		3 Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	65	100	100	100	100	100	100							
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1 Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	80	90	90	90	90	90	90							Perencanaan, Data dan Informasi
		2 Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	70	90	90	90	90	90	90							
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	80	0	80	82	84	85	85							Umum dan Humas
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1 Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	85	90	90	90	90	90	90							Umum dan Humas
		2 Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	85	95	95	95	95	95	95							
		3 Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	90	95	95	95	95	95	95							

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE	TARGET KINERJA						ALOKASI (DALAM JUTAAAN RUPIAH)						PENANGGUNG JAWAB
					2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	2020	2021	2022	2023	2024	TOT AL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4 Persentase menurunnya lelang gagal	%	0	0	0	0	0	0	0							
		5 Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	%	0	0	0	0	0	0	0							
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	80	80	81	82	83	85	85							Umum dan Humas
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1 Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	%	85	90	90	90	90	90	90							Umum dan Humas
		2 Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang discounter	%	90	95	95	95	95	95	95	95						
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1 Jumlah sistem informasi yang memenuhi standar	%	70	80	81	82	83	85	85							Perencanaan, Data dan Informasi
		2 Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	75	90	90	90	90	90	90	90						
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	Persentase Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	%	0	0	0	0	0	0	0							Kepegawaian dan Hukum

Sumber : Subbag Perencanaan Data dan Informasi 2020

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)						Unit Organisasi Pelaksana
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT		528,579,622	546,147,783	569,535,283	590,760,455	2,235,023,143	
Program Dukungan Manajemen		302,799,292	308,950,323	318,491,921	328,077,067	1,258,318,603	
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN		312,980	443,280	467,840	491,098	1,715,198	BAGIAN TATA USAHA
Pembinaan Administrasi Kepegawaian		494,817	654,908	674,879	691,097	2,515,701	BAGIAN TATA USAHA
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN		23,629,194	24,002,257	24,134,321	24,221,678	95,987,450	BAGIAN TATA USAHA
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana		175,000	195,000	205,000	215,000	790,000	BAGIAN TATA USAHA
Pembinaan Administrasi Perencanaan		1,055,000	1,073,111	1,378,087	1,121,315	4,627,513	BAGIAN TATA USAHA
Pembinaan Administrasi Umum		10,616,007	11,000,000	11,013,210	11,135,217	43,764,434	BAGIAN TATA USAHA
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan		80,000	115,321	167,581	192,473	555,375	BAGIAN TATA USAHA
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		9,236,202	9,340,625	9,423,520	9,577,959	37,578,306	BIDANG PHU
Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		162,140,216	165,226,275	172,364,560	179,750,386	679,481,437	BIDANG MADRASAH DAN BIDANG PAKIS
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam		78,500,000	79,677,500	80,872,600	82,085,700	321,135,800	BIDANG BIMAS ISLAM
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen		1,338,820	1,365,597	1,392,909	1,420,767	5,518,093	PEMBIMAS KRISTEN
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen		10,218,813	10,474,284	10,736,141	11,004,544	42,433,782	PEMBIMAS KRISTEN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik		1,943,560	2,040,738	2,142,774	2,249,913	8,376,985	PEMBIMAS KATOLIK
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik		1,450,300	1,525,000	1,585,300	1,645,500	6,206,100	PEMBIMAS KATOLIK
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu		116,360	126,748	132,787	158,755	534,650	PEMBIMAS HINDU
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu		1,180,423	1,346,949	1,450,545	1,701,655	5,679,572	PEMBIMAS HINDU
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha		309,000	340,000	347,000	411,000	1,407,000	PEMBIMAS BUDDHA
Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha		2,600	2,730	2,867	3,010	11,207	PEMBIMAS BUDDHA
Program Kerukunan Umat Dan Layanan Kehidupan Beragama		26,204,851	28,404,108	29,550,690	30,531,299	114,690,948	
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		1,274,466	1,357,611	1,481,243	1,511,247	5,624,567	BAGIAN TATA USAHA
Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		9,533,758	9,724,500	9,918,500	10,117,300	39,294,058	BIDANG BIMAS ISLAM

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)						Unit Organisasi Pelaksana
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT		528,579,622	546,147,783	569,535,283	590,760,455	2,235,023,143	
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf		596,700	608,600	620,800	633,200	2,459,300	BIDANG BIMAS ISLAM
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam		6,777,500	6,913,050	7,051,300	7,192,300	27,934,150	BIDANG BIMAS ISLAM
Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah		533,500	560,200	589,200	618,500	2,301,400	BIDANG BIMAS ISLAM
Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu		-	-	-	-	0	BAGIAN TATA USAHA
Pembinaan Umrah dan Haji Khusus		75,000	77,000	79,000	81,000	312,000	BIDANG PHU
Pelayanan Haji Dalam Negeri		3,050,580	3,150,310	3,243,754	3,335,543	12,780,187	BIDANG PHU
Pembinaan Haji		642,370	734,255	875,230	978,160	3,230,015	BIDANG PHU
Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji		325,740	354,230	415,523	453,490	1,548,983	BIDANG PHU
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen		152,632	1,181,448	1,210,984	1,241,259	3,786,323	PEMBIMAS KRISTEN
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik		1,859,950	2,217,450	2,328,500	2,444,700	8,850,600	PEMBIMAS KATOLIK
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu		650,655	720,454	850,656	950,600	3,172,365	PEMBIMAS HINDU
Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha		732,000	805,000	886,000	974,000	3,397,000	PEMBIMAS BUDDHA
Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran		165,321,455	170,728,840	178,540,947	185,600,496	700,191,738	
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		40,120,300	41,356,422	43,440,230	45,780,443	170,697,395	BIDANG PAKIS
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam		3,620,866	5,400,000	5,600,000	5,800,000	20,420,866	BIDANG PAKIS
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen		1,104,369	1,131,978	1,160,277	1,189,284	4,585,908	PEMBIMAS KRISTEN
Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah		52,112,620	53,225,340	56,445,370	58,760,221	220,543,551	BIDANG MADRASAH
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah		66,110,300	67,120,100	69,220,398	71,320,448	273,771,246	BIDANG MADRASAH
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik		1,600,000	1,750,000	1,837,000	1,909,500	7,096,500	PEMBIMAS KATOLIK
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu		250,000	302,000	350,672	410,600	1,313,272	PEMBIMAS HINDU
Pengelolaan dan Pembinaan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha		403,000	443,000	487,000	430,000	1,763,000	PEMBIMAS BUDDHA
Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu		-	-	-	-	0	BAGIAN TATA USAHA
Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun		34,254,024	38,064,512	42,951,725	46,551,593	161,821,854	
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen		125,378	128,512	131,725	135,018	520,633	PEMBIMAS KRISTEN
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Keagamaan Islam		20,713,446	24,009,800	27,000,000	29,100,000	100,823,246	BIDANG PAKIS
Peningkatan Akses dan Kualitas Madrasah		10,151,200	10,450,300	12,124,220	13,340,470	46,066,190	BIDANG MADRASAH

PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI (DALAM RIBUAN RUPIAH)						Unit Organisasi Pelaksana
	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT		528,579,622	546,147,783	569,535,283	590,760,455	2,235,023,143	
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik		2,520,000	2,646,000	2,778,000	2,917,215	10,861,215	PEMBIMAS KATOLIK
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu		400,000	450,900	500,780	600,890	1,952,570	PEMBIMAS HINDU
Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha		344,000	379,000	417,000	458,000	1,598,000	PEMBIMAS BUDDHA

Lampiran

Tim Penyusun Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2020-2024

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. M. Muflih B. Fattah | 21. Muhammad Amin |
| 2. Syamsul | 22. Nur Asiah |
| 3. Muhammad Dinar Faisal | 23. Faridah |
| 4. Ahmad Barambangy | 24. Ahyani |
| 5. Misbahuddin | 25. Fadhilah Indrayani Dotja |
| 6. Suharli | 26. Abd. Hannan |
| 7. Ayub | 27. Achmad Harjadinata |
| 8. Petrus Tandilodang | 28. Muhajir |
| 9. I Wayan Suparka | 29. St. Hajrah |
| 10. TS. Haryanto | 30. Muh. Mahdi |
| 11. Adhar | 31. Abdullah Rasyid |
| 12. Kamaruddin | 32. Muhammad Sadik |
| 13. Arifin | 33. Hastomo |
| 14. M. Sahlan | 34. Arman |
| 15. Muhammad Abidin | 35. Nuryanto |
| 16. Tauhid | 36. Haedar |
| 17. Abd. Majid | 37. Marlyna |
| 18. Syamsumarlin | 38. Seity Karundeng |
| 19. Najamuddin | 39. I Wayan Santika |
| 20. Arisal | 40. Fery Winarni |